

LKjIP

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 2023



**SEKRETARIAT DAERAH
PROVINSI BANTEN**

IKHTISAR EKSEKUTIF

Sehubungan pada Perubahan Perjanjian Kinerja Sekretaris Daerah Tahun 2023 Sasaran Strategis dan Indikator Kinerjanya merupakan Sasaran Daerah (Program, Kegiatan dan Pendanaannya dilaksanakan oleh Organisasi Perangkat Daerah Teknis), maka Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Sekretariat Daerah Provinsi Banten Tahun 2023 ini menyajikan informasi capaian target Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Para Kepala Biro dilingkungan Sekretariat Daerah Provinsi Banten adalah sebagai berikut:

1. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah dengan indikator nilai Capaian SAKIP Perangkat Daerah (Setda)
2. Meningkatnya Kebijakan Daerah dengan indikator Nilai Indeks Kualitas Kebijakan (Biro Hukum)
3. Meningkatnya Kerjasama dan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan dengan indikator nilai Skoring/Nilai Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah)
4. Meningkatkan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat dengan indikator nilai Persentase Realisasi Rumusan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat yang diimplementasikan (Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah)
5. Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pengadaan Barang dan Jasa yang baik dan bebas KKN dengan indikator nilai Indeks Tata Kelola Pengadaan Barang dan Jasa (Biro Pengadaan Barang/Jasa dan LPSE)
6. Meningkatnya Kualitas Kebijakan Perekonomian Daerah dengan indikator nilai Persentase Realisasi Rumusan Bidang Perekonomian Daerah yang diimplementasikan (Biro Perekonomian dan Administrasi Permbangunan)
7. Meningkatnya Kualitas Kebijakan Administrasi Pembangunan dengan indikator Persentase Realisasi Rumusan Kebijakan Administrasi Pembangunan yang diimplementasikan (Biro Perekonomian dan Administrasi Permbangunan)
8. Menigkatnya Kualitas Pelayanan Pimpinan Daerah dengan

indikator Persentase Realisasi Pelayanan Pimpinan Daerah (Biro Administrasi Pimpinan dan Protokol)

9. Meningkatnya Kualitas Kelembagaan Yang Terukur dengan indikator nilai Indeks Kelembagaan (Biro Organisasi dan Reformasi Birokrasi)
10. Meningkatnya Kepatuhan Pelayanan Publik dengan indikator nilai Kepatuhan Pelayanan Publik (Biro Organisasi dan Reformasi Birokrasi)
11. Meningkatnya Nilai Komponen Pelaporan SAKIP Provinsi (Penugasan Dari Sekretaris Daerah) dengan indikator nilai Komponen Pelaporan SAKIP Provinsi (Biro Organisasi dan Reformasi Birokrasi)
12. Meningkatnya Kuaslitas Pelayanan Setda dengan indikator Presentase Realisasi Pelayanan Setda (Biro Umum dan Perlengkapan)

Laporan ini memuat capaian kinerja biro-biro di lingkungan Sekretariat Daerah dengan menampilkan target dan capaian indikator kinerja pada setiap sasaran strategis, capaian 12 indikator kinerja pada tahun 2023 adalah sebagai berikut :

1. Nilai Capaian SAKIP Perangkat Daerah pada tahun 2023 ditargetkan mencapai 70-80, sehubungan penilaian SAKIP 2023 dilaksanakan pada tahun 2024 maka, dalam laporan ini menyajikan capaian nilai sakip Setda Tahun 2022 yaitu sebesar 80,25.
2. Nilai Indeks kualitas kebijakan ditargetkan mencapai 60 realisasi 71 atau 118%;
3. Nilai Skoring/Nilai LPPD ditargetkan mencapai 4,24 hasil nilai 3,45 (nilai tahun 2022)
4. Presentase Rumusan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat yang di implementasikan ditargetkan 100% hasil 100%.
5. Nilai Indek Tata Kelola Pengadaan Barang dan Jasa ditargetkat 80,8 realisasi 88,59 atau 109,64%
6. Presentase Realisasi Rumusan Kebijakan Bidang Perekonomian yang di implementasikan ditargetkan 100% hasil 100%

7. Presentase Realisasi Rumusan Kebijakan Administrasi yang di implementasikan ditargetkan 100% hasil 100%.
8. Presentase Realisasi Pelayanan Pimpinan ditargetkan 100% hasil 100%.
9. Nilai indeks kelembagaan ditargetkan mencapai 42-60 hasil 84,2 atau 205,37%
10. Nilai kepatuhan pelayanan publik ditargetkan mencapai 81,81 hasil 91,16 atau 111,16%
11. Nilai komponen pelaporan SAKIP Provinsi ditargetkan mencapai 10,7 hasil 10,24 atau 95,08%
12. Persentase realisasi pelayanan SETDA ditargetkan mencapai 100% hasil 100%

Realisasi anggaran belanja yang dibutuhkan untuk mencapai sasaran adalah sebesar Rp. 225.667.272.636,- (Dua ratus dua puluh lima milyar enam ratus enam puluh tujuh juta dua ratus tujuh puluh dua ribu enam ratus tiga puluh enam rupiah) dari total anggaran belanja Rp. 248.211.269.200,- (Dua ratus empat puluh delapan milyar dua ratus sebelas juta dua ratus enam puluh sembilan ribu dua ratus rupiah) sehingga Sekretariat Daerah Provinsi Banten melakukan efisiensi anggaran sebesar Rp. 22.543.996.564,- (Dua puluh dua milyar lima ratus empat puluh tiga juta sembilan ratus sembilan puluh enam ribu lima ratus enam puluh empat rupiah).

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Puji dan syukur kami panjatkan kehadirat Alloh SWT., karena berkat rahmat dan hidayah Nya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Sekretariat Daerah Provinsi Banten Tahun 2023 dapat disajikan, yang mana merupakan sarana bagi Sekretariat Daerah Provinsi Banten selaku Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk menyampaikan pertanggungjawaban kinerja tahun 2023 kepada seluruh stakeholder/pemangku kepentingan dan sebagai sarana evaluasi atas pencapaian kinerja Sekretariat Daerah Provinsi Banten dalam memperbaiki kinerja dimasa depan.

Laporan kinerja Sekretariat Daerah Provinsi Banten disusun berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Sebagaimana diketahui Intruksi Presiden nomor 7 Tahun 1999, mengamanatkan akuntabilitas kinerja sebagai perwujudan dan kewajiban Instansi Pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan dalam misi organisasi dalam mencapai tujuan-tujuan dan sasaran-sasaran yang ditetapkan dan rencana strategis. *Pengejawantahan* pertanggungjawaban dan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP).

Laporan kinerja Sekretariat Daerah Provinsi Banten merupakan implementasi pengukuran pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rancan Strategis Sekretariat Daerah Provinsi Banten, diharapkan dapat dimanfaatkan untuk melakukan koreksi atas kelemahan yang ada, dan mempertajam prioritas pembangunan ditahun yang akan datang, sehingga dapat meningkatkan kinerja yang lebih baik dan diharapkan laporan ini dapat memberikan manfaat bagi seluruh aparatur dilingkungan Sekretariat

Daerah Provinsi Banten untuk perbaikan dan peningkatan kinerja dimasa yang akan datang.

Akhirnya kami berharap agar informasi yang disajikan dalam evaluasi kinerja diakhir tahun anggaran 2023 dapat dimanfaatkan untuk melakukan evaluasi atas kinerja pembangunan serta koreksi atas kelemahan yang ada dan dapat mempertajam prioritas rencana pembangunan untuk terwujudnya peningkatan kualitas kinerja Sekretariat Daerah Provinsi Banten menuju tata kelola pemerintahan yang baik.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Serang, ~~31~~ Januari 2024

PI SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI BANTEN,



Ir. Hj. VIRGOJANTI, M.Si

Pembina Utama Madya
NIP.19680902 199603 2 002

DAFTAR ISI

IKTISAR EKSEKUTIF i

KATA PENGANTAR iv

DAFTAR ISI vi

DAFTAR TABEL viii

DAFTAR GAMBAR ix

BAB I PENDAHULUAN 1

 1.1 Latar Belakang 2

 1.2 Maksud dan Tujuan 2

 1.3 Dasar Hukum..... 2

 1.4 Struktur Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi 3

 1.5 Isu-isu Strategis Sekretariat Daerah..... 8

 1.6 Peta Proses Bisnis Sekretariat Daerah 10

 1.7 Cascading Sekretariat Daerah 11

 1.8 Tindak Lanjut atas Laporan Hasil Evaluasi SAKIP
 Tahun 2022 11

 1.9 Sistematika Penyusunan Laporan Kinerja Sekretariat
 Daerah Provinsi 13

BAB II PERENCANAAN KINERJA 15

 2.1 Rencana Strategis Tahun 2023-2026 15

 2.1.1 Visi Pemerintah Provinsi Banten 15

 2.1.2 Misi Pemerintah Provinsi Banten 15

 2.1.3 Tujuan Sekretariat Daerah Provinsi Banten 16

 2.1.4 Sasaran Sekretariat Daerah Provinsi Banten 16

 2.2 Rencana Kerja Tahun 2023 17

 2.3 Perjanjian Kinerja 40

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA 48

 3.1 Capaian Kinerja 48

 3.1.1 Capaian Kinerja Sekretariat Daerah Tahun 2023 50

 3.1.2 Capaian Kinerja di Bandingkan Dengan Tahun
 Sebelumnya 51

 3.1.3 Capaian Kinerja dibandingkan Dengan Target
 Jangka Menengah (Renstra) Tahun 2023 - 2026..... 53

3.1.4 Perbandingan Antara Realisasi Kinerja Sekretariat Daerah Tahun 2023 dengan Standar Nasional.....	54
3.1.5 Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan Atau Peningkatan/Penurunan Kinerja Tahun 2023 Setda...	54
3.1.6 Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Setda Tahun 2023	60
3.1.7 Analisis Program dan Kegiatan Yang Menunjang Keberhasilan/Kegagalan Pencapaian Perjanjian Kinerja	62
3.2 Realisasi Anggaran	77
BAB IV PENUTUP	81
4.1 Kesimpulan	81
4.2 Saran	82
Lampiran-lampiran	
1) Perjanjian Kinerja	
2) Surat Pernyataan Telah Di Reviu	
3) Piagam Anugerah Pengadaan 2023 Peringkat 3 Kategori Pemerintah Provinsi Dengan Nilai Transaksi UMK Terbesar	
4) Piagam Penghargaan Mitra Plaza Banten dalam Mewujudkan UMKM Go Digital (Biro Pengadaan Barang/Jasa dan LPSE Provinsi Banten)	
5) Piagam Penghargaan Terbaik Ke-2 Nasional Indeks Reformasi Hukum Tahun 2023 Kategori Pemerintah Provinsi (Biro Hukum)	
6) Piagam Penghargaan Terbaik Ke-4 Nasional Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) Provinsi Banten Tingkat Provinsi (Biro Hukum)	

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Rencana Tindak Lanjut (RTL) Catatan Hasil Reviu (CHR) atas SAKIP Setda tahun 2022	12
Tabel 2.1	Target Kinerja Renstra Sekretariat Daerah Tahun 2023-2026	18
Tabel 2.2	Rincian Program dan Kegiatan Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah	21
Tabel 2.3	Rincian Program dan Kegiatan Biro Hukum	24
Tabel 2.4	Rincian Program dan Kegiatan Biro Perekonomiandan Administrasi Pembangunan.....	26
Tabel 2.5	Rincian Program dan Kegiatan Biro Pengadaan Barang / Jasa dan Layanan Pengadaan Secara Elektronik	29
Tabel 2.6	Rincian Program dan Kegiatan Biro Organisasi dan Reformasi Birokrasi	32
Tabel 2.7	Rincian Program dan Kegiatan Biro Administrsi Pimpinan dan Protokol	35
Tabel 2.8	Rincian Program dan Kegiatan Biro Umum dan Perlengkapan	37
Tabel 2.9	Perbandingan Target kinerja Perjanjian Kinerja Murni dengan Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun Anggaran 2023 Kepala Biro dilingkungan Sekretariat Daerah	41
Tabel 3.1	Skala Nilai Peringkat Kinerja	48

DAFTAR GAMBAR

Tabel 1.1 Struktur Organisasi Sekretariat Daerah 8

Tabel 1.2 Peta Proses Bisnis Sekretariat Daerah 10

Tabel 1.3 Peta Relasi Sekretariat Daerah 11

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sejalan dengan diterbitkannya Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagai pengganti Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, maka Penyelenggaraan Otonomi Daerah mengalami perubahan-perubahan yang mendasar, Penyelenggaraan Otonomi sebagaimana dibuat dalam undang-undang tersebut akan jauh demokratis dan memiliki kewenangan yang luas dengan pemberian sumber daya nasional dan pembagian keuangan yang proporsional dan adil, hal ini tentu saja akan mengakibatkan adanya kinerja pemerintah yang didasarkan pada akuntabilitas, responsivitas dan aksesibilitas dalam memberikan pelayanan barang dan jasa pemerintah selain dari adanya desain kualitas prima bagi Produk Pemerintah Daerah menurut Undang- undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.

Akuntabilitas merupakan azas dalam penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang baik (Good Governance), yang dapat didefinisikan sebagai perwujudan kewajiban seseorang atau unit organisasi untuk mempertanggungjawabkan Pengelolaan Sumber daya dan Pelaksanaan Kebijakan yang dipercayakan kepadanya dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditetapkan melalui media pertanggungjawaban sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku, Akuntabilitas dapat diuraikan sebagai kewajiban untuk menjawab dan menjelaskan kinerja dari tindakan seseorang atau lembaga kepada pihak-pihak yang memiliki hak untuk meminta jawaban atau keterangan dari orang atau lembaga yang telah diberikan wewenang untuk mengelola sumber daya tertentu, Akuntabilitas juga merupakan Instrumen untuk kegiatan kontrol terutama dalam pencapaian hasil pada pelayanan publik.

1.2 Maksud dan Tujuan

Laporan evaluasi kinerja program, kegiatan dan Anggaran Sekretariat Daerah Provinsi Banten akhir tahun 2023 ini disusun sebagai bagian Integral dari siklus Akuntabilitas Kinerja pelaksanaan kegiatan satuan kinerja Pemerintah Daerah Provinsi Banten. Laporan evaluasi kinerja Sekretariat Daerah Provinsi Banten adalah wujud implementasi pengendalian manajemen yang berkenaan dengan penyelenggaraan urusan Desentralisasi, Dekonsentrasi dan program tugas pembantuan, Sistem pengendalian ini sebagai mekanisme untuk mengukur sejauh mana pencapaian kinerja perencanaan tahunan terhadap Visi, Misi, Strategi dan sasaran program kegiatan yang tertuang dalam perubahan rencana strategis Sekretariat Daerah Provinsi Banten tahun 2023-2026.

1.3 Dasar Hukum

1. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Peraturan pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi Tahun 2010-2025;
4. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
5. Peraturan menteri PAN dan RB Nomor 53 Tahun 2014 tentang petunjuk teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
6. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Banten;
7. Peraturan Gubernur Banten Nomor 59 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Uraian Tugas Jabatan Pimpinan Tinggi, Administrator, dan Pengawas Perangkat Daerah;
8. Peraturan Gubernur Banten Nomor 3 Tahun 2022 tentang

Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Banten Tahun 2023-2026;

9. Peraturan Gubernur Nomor 45 Tahun 2022 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Sekretariat Daerah;
10. Peraturan Gubernur Nomor 33 Tahun 2023 Tentang Pedoman Pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

1.4 Struktur Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi

Berdasarkan Peraturan Gubernur Banten Nomor 45 Tahun 2022 Lampiran I disebutkan bahwa bentuk susunan organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Banten terdiri dari:

- a. Sekretaris Daerah;
- b. Asisten Pemerintahan Umum dan Kesejahteraan Rakyat, membawahkan:
 1. Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah;
 2. Biro Hukum.
- c. Asisten Pembangunan, Perekonomian dan Pengadaan membawahkan:
 1. Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan;
 2. Biro Pengadaan Barang/Jasa dan Layanan Pengadaan Secara Elektronik.
- d. Asisten Administrasi Umum, membawahkan:
 1. Biro Administrasi Pimpinan dan Protokol;
 2. Biro Umum dan Perlengkapan;
 3. Biro Organisasi dan Reformasi Birokrasi.
- e. Kelompok Jabatan Fungsional.

Susunan Organisasi Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah terdiri atas :

- a. Kepala Biro;
- b. Kepala Bagian Pemerintahan, Otonomi Daerah dan Kesejahteraan Rakyat;

- c. Kepala Sub Bagian Tata Usaha; dan
- d. Jabatan Fungsional dan Pelaksana.

Susunan Organisasi Biro Hukum, terdiri atas :

- a. Kepala Biro;
- b. Kepala Bagian Peraturan Perundang-Undangan;
- c. Kepala Bagian Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia;
- d. Kepala Sub Bagian Tata Usaha;
- e. Jabatan Fungsional dan Pelaksana.

Susunan organisasi Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan, terdiri atas:

- a. Kepala Biro;
- b. Kepala Sub Bagian Tata Usaha; dan
- c. Jabatan Fungsional dan Pelaksana.

Susunan organisasi Pengadaan/Jasa dan Layanan Pengadaan Secara Elektronik, terdiri atas:

- a. Kepala Biro;
- b. Kepala Bagian Pengelolaan Pengadaan Barang/Jasa;
- c. Kepala Bagian Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik;
- d. Kepala Bagian Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang/Jasa;
- e. Kepala Sub Bagian Perencanaan, Keuangan dan Pengendalian; dan
- f. Jabatan Fungsional dan Pelaksana.

Susunan organisasi Biro Administrasi Pimpinan dan Protokol, terdiri atas :

- a. Kepala Biro;
- b. Kepala Bagian Perencanaan, Evaluasi, Pelaporan dan Kepegawaian Sekretariat Daerah;
- c. Kepala Sub Bagian Tata Usaha;
- d. Kepala Bagian Materi dan Komunikasi Pimpinan;
- e. Kepala Bagian Protokol; dan
- f. Jabatan Fungsional dan Pelaksana

Susunan organisasi Biro Umum dan Perlengkapan, terdiri atas :

- a. Kepala Biro;
- b. Kepala Bagian Umum;
- c. Kepala Sub Bagian Tata Usaha;
- d. Kepala Bagian Pengelolaan Keuangan dan Barang Milik Daerah Sekretariat Daerah;
- e. Kepala Bagian Rumah Tangga Pimpinan; dan
- f. Jabatan Fungsional dan Pelaksana.

Susunan organisasi Biro Organisasi dan Reformasi Birokrasi, terdiri atas :

- a. Kepala Biro;
- b. Kepala Bagian Tatalaksana;
- c. Kepala Sub Bagian Tata Usaha;
- d. Kepala Bagian Kelembagaan dan Analisa Jabatan;
- e. Kepala Bagian Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja;
- F. Jabatan Fungsional dan Pelaksana.

Berdasarkan Peraturan Gubernur Banten No. 45 Tahun 2022 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Sekretariat Daerah sebagaimana tercantum dalam pasal 15 ayat 1 berbunyi : Sekretaris Daerah mempunyai tugas pokok membantu Gubernur dalam penyusunan kebijakan dan pengoordinasian administratif terhadap pelaksanaan tugas Perangkat Daerah serta pelayanan administratif, dalam menyelenggarakan fungsinya sebagai tercantum dalam pasal 15 ayat (2) berbunyi : point (a) pengoordinasian penyusunan kebijakan Daerah, point (b) pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, point (c) pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan Daerah, point (d) pelayanan administratif dan pembinaan aparatur sipil negara pada instansi Daerah, dan point(e) pengoordinasian pelaksanaan tugas Staf Ahli, point (f) pelaksanaan tugas lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. dan pada ayat (3) Pelaksanaan tugas lain sebagaimana dimaksud pada ayat

(2) huruf (f) antara lain Sekretaris Daerah sebagai Sekretaris Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Asisten Pemerintahan umum dan Kesejahteraan Rakyat sebagaimana melaksanakan tugas pokok membantu Sekretaris Daerah dalam penyusunan, pengoordinasian penyusunan, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah, serta pengoordinasian pelaksanaan tugas perangkat daerah di bidang pemerintahan, otonomi daerah, kesejahteraan rakyat dan hukum.

Asisten Pembangunan, Perekonomian dan Pengadaan melaksanakan tugas pokok membantu Sekretaris Daerah pengoordinasian penyusunan kebijakan daerah, pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, penyusunan kebijakan daerah, melakukan pembinaan, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah di bidang perekonomian, pengadaan barang dan jasa serta administrasi pembangunan.

Asisten Administrasi Umum melaksanakan tugas pokok membantu Sekretaris Daerah dalam penyusunan kebijakan daerah, pelaksanaan kebijakan, pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah di bidang administrasi pimpinan, umum dan organisasi.

Biro Pemerintahan dan Otonomi daerah mempunyai tugas pokok membantu Asisten Pemerintahan Umum dan Kesejahteraan Rakyat dalam penyiapan perumusan kebijakan daerah, pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan di bidang pemerintahan, otonomi daerah dan kesejahteraan rakyat.

Biro Hukum mempunyai tugas pokok membantu Asisten Pemerintahan Umum dan Kesejahteraan Rakyat dalam penyiapan perumusan kebijakan daerah, pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan di bidang fasilitasi dan koordinasi hukum.

Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan mempunyai tugas pokok membantu Asisten Pembangunan, Perekonomian dan Pengadaan dalam penyiapan pengoordinasian perumusan kebijakan daerah, pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah di bidang perekonomian dan pembangunan serta kebijakan administrasi pembangunan.

Biro Pengadaan Barang/Jasa dan Layanan Pengadaan Secara Elektronik mempunyai tugas pokok membantu Asisten Pembangunan, Perekonomian dan Pengadaan dalam penyiapan perumusan kebijakan daerah, pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah di bidang kebijakan dan pelayanan pengadaan barang dan jasa.

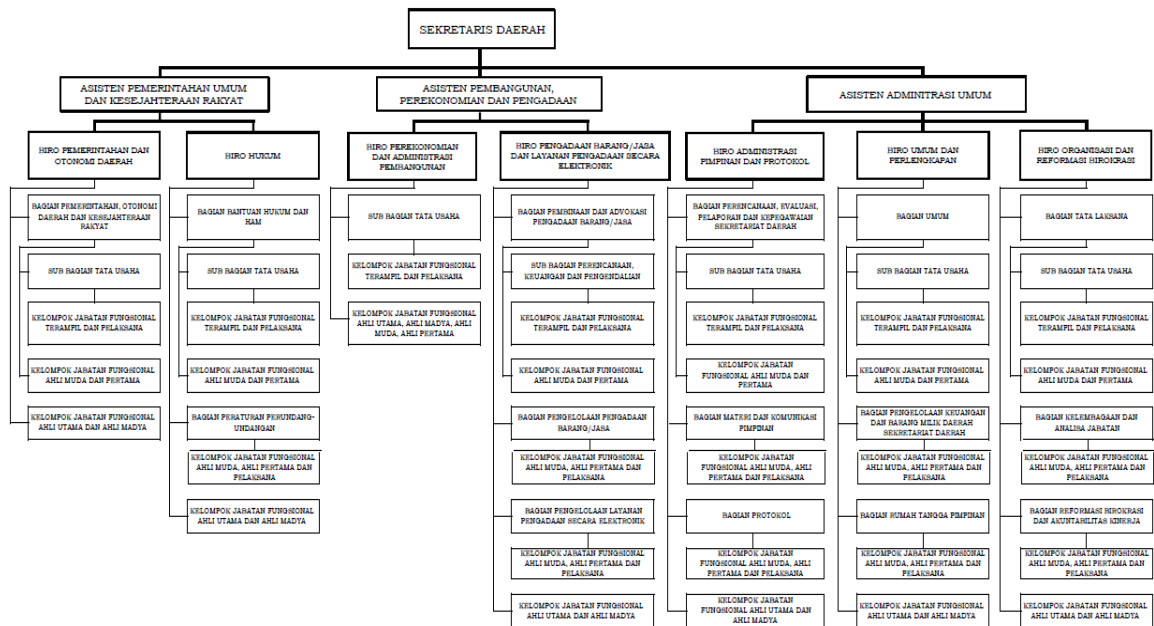
Biro Administrasi Pimpinan dan Protokol mempunyai tugas pokok membantu Asisten Administrasi Umum dalam penyiapan pelaksanaan kebijakan, pelaksanaan pemantauan dan evaluasi di bidang perencanaan, evaluasi, pelaporan dan kepegawaian Sekretariat Daerah, materi dan komunikasi pimpinan, serta protokol.

Biro Umum dan Perlengkapan mempunyai tugas pokok membantu Asisten Administrasi Umum dalam penyiapan pelaksanaan kebijakan, pelaksanaan pemantauan dan evaluasi di bidang umum dan keuangan, pengelolaan barang milik daerah, serta Rumah Tangga Pimpinan.

Biro Organisasi dan Reformasi Birokrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf g, mempunyai tugas pokok membantu Asisten Administrasi Umum dalam penyiapan perumusan kebijakan daerah, pengoordinasian perumusan kebijakan daerah, pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah di bidang penataan organisasi.

Gambar 1

STRUKTUR ORGANISASI SEKRETARIAT DAERAH



Sumber Data : Peraturan Gubernur No. 45 Tahun 2022

1.5 Isu-isu Strategis Sekretariat Daerah

Permasalahan yang menjadi isu strategis Sekretariat Daerah Provinsi Banten saat ini antara lain :

1. Belum optimalnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan kesejahteraan rakyat daerah menuju clean and good governance;
2. Masih kurangnya kualitas dan kuantitas produk hukum daerah;
3. Belum selarasnya peraturan perundangan daerah dengan regulasi hukum nasional, belum optimalnya pelayanan bantuan hukum dan HAM;
4. Masih kurangnya implementasi kebijakan perekonomian daerah;
5. Masih rendahnya implelementasi dan pengendalian kebijakan Sarana Perekonomian, Industri Jasa dan Ketenagakerjaan, serta produksi daerah;
6. Belum maksimalnya kinerja layanan Administrasi Pembangunan;
7. Belum optimalnya pengelolaan dan pelayanan pengelolaan pengadaan barang/jasa dilingkungan Permerintah Provinsi Banten;
8. Belum optimalnya kualitas perencanaan dan kepegawaian Sekretariat Daerah;

9. Belum optimalnya kualitas keprotokolan pimpinan;
10. Belum optimalnya kualitas materi dan komunikasi pimpinan;
11. Masih kurangnya kualitas pelayanan di Sekretariat Daerah;
12. Masih kurangnya Prasarana dan sarana penunjang kinerja di Lingkungan Setda;
13. Belum optimalnya efektifitas kelembagaan;
14. Belum optimalnya kualitas pelayanan publik;
15. Belum optimal akuntabilitas kinerja penyelenggaraan pemerintahan.

Aspek strategis merupakan penjabaran lebih detail dari Tujuan Sekretaris Daerah dengan 12 indikator dan target yang terukur. Dengan demikian aspek tersebut dijabarkan melalui Sasaran Strategis Sekretariat Daerah Provinsi Banten tahun 2023 adalah sebagai berikut:

Sasaran Strategis 1 : Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah dengan 1 indikator sasaran.

Sasaran Strategis 2 : Meningkatnya Kebijakan Daerah dengan 1 indikator sasaran

Sasaran Strategis 3 : Meningkatnya Kerjasama dan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan dengan 1 indikator sasaran

Sasaran Strategis 4 : Meningkatkan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat dengan 1 indikator sasaran

Sasaran Strategis 5 : Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pengadaan Barang dan Jasa yang baik dan bebas KKN dengan 1 indikator sasaran

Sasaran Strategis 6 : Meningkatnya Kualitas Kebijakan Perekonomian Daerah dengan 1 indikator sasaran

Sasaran Strategis 7 : Meningkatnya Kualitas Kebijakan Administrasi Pembangunan dengan 1 indikator sasaran

- Sasaran Strategis 8 : Meningkatnya Kualitas Pelayanan Pimpinan Daerah 1 indikator sasaran
- Sasaran Strategis 9 : Meningkatnya Kualitas Kelembagaan Yang Terukur dengan 1 indikator sasaran
- Sasaran Strategis 10 : Meningkatnya Kepatuhan Pelayanan Publik dengan 1 indikator sasaran
- Sasaran Strategis 11 : Meningkatnya Nilai Komponen Pelaporan SAKIP Provinsi (Penugasan Dari Sekretaris Daerah) dengan 1 indikator sasaran
- Sasaran Strategis 12 : Meningkatnya Kualitas Pelayanan Setda dengan 1 indikator sasaran

1.6 Peta Proses Bisnis Sekretariat Daerah

Sebagaimana diamanatkan dalam Keputusan Gubernur Banten Nomor 060/Kep-73-Huk/2023 tentang Penetapan Peta Proses Bisnis Pemerintah Daerah Provinsi Banten bahwa setiap Perangkat Daerah perlu menyusun dan menetapkan Peta Proses Bisnis. Untuk Proses Bisnis Sekretariat Daerah Provinsi Banten telah ditetapkan dalam Keputusan Sekretarais Daerah Provinsi Banten Nomor : 60/Kep-59-Adpimpro/2023 sebagai berikut:

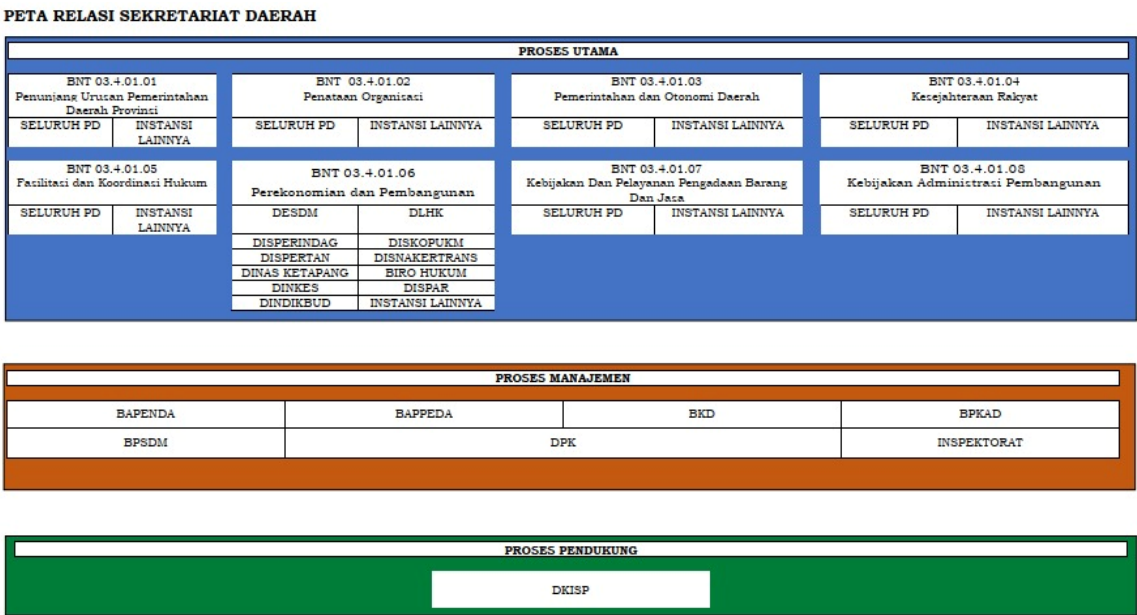
Gambar 1.2
Peta Proses Bisnis Sekretariat Daerah Provinsi Banten



1.7 Cascading Sekretariat Daerah

Sekretariat Daerah penyusunan kebijakan dan pengoordinasian administratif terhadap pelaksanaan tugas Perangkat Daerah serta pelayanan administratif, dalam proses pelaksanaannya harus berkolaborasi dan menjalin relasi dengan berbagai pihak terkait sebagaimana telah dipetakan berikut:

Gambar 1.3
Peta Relasi Sekretariat Daerah Provinsi Banten



1.8 Tindak Lanjut atas Laporan Hasil Evaluasi SAKIP Tahun 2022

Berdasarkan Berita Acara penilaian hasil evaluasi Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) Inspektorat Daerah Provinsi Banten atas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) pada Sekretariat Daerah Provinsi Banten tahun 2022 yang dilaksanakan pada tanggal 27 Maret tahun 2023, telah disusun rencana aksi sebagaimana tabel 1.1 berikut.

Tabel 1.1
Tindak Lanjut LHE SAKIP Sekretariat Daerah Tahun 2022

No.	Rekomendasi	Tindak Lanjut/ Rencana Aksi	Progres Atas Rencana Aksi
1	Agar memanfaatkan informasi laporan kinerja tahunan sebagai upaya perbaikan dalam penyusunan dokumen perencanaan kinerja tahun berikutnya	Menyusun Dokumen : 1. Renstra Sekretariat Daerah Tahun 2023-2026 2. Renja Sekretariat Daerah Tahun 2024 3. Perjanjian Kinerja Tahun 2023	Telah tersusun : 1. Renstra Sekretariat Daerah Tahun 2023-2026 2. Renja Sekretariat Daerah Tahun 2024 3. Perjanjian Kinerja Tahun 2023 Dokumen Rencana Kerja telah memuat perbandingan capaian kinerja dengan tahun sebelumnya.
2	Melaksanakan kordinasi dan pembahasan dengan perangkat daerah yang mengampu Indikator Kinerja utama Sekretaris Daerah terkait mekanisme perencanaan kinerja, pengumpulan data kinerja, pelaporan kinerja, dan evaluasi kinerja;	Melaksanakan rapat koordinasi dan evaluasi dengan Perangkat Daerah yang mengampu Indikator Kinerja utama Sekretaris Daerah	Laporan hasil Rapat Koordinasi dan Evaluasi (Notulen Rapat)
3	Hasil pengukuran kinerja agar dimanfaatkan sebagai bahan evaluasi pencapaian target kinerja yang ditetapkan dalam perjanjian kinerja.	Menyusun Dokumen : 1. Rencana Kerja Tahun 2023 2. Perjanjian Kinerja Tahun 2023	Pengukuran kinerja telah dijadikan acuan dalam penentuan target kinerja tahun berikutnya : 1. Rencana Kerja Tahun 2023 2. Perjanjian Kinerja Tahun 2023
4	Melaksanakan Riviui Indikator Kinerja Utama (IKU) mandiri sebagai bahan pertimbangan dalam pembuatan kebijakan, perencanaan dan penganggaran serta memastikan terdapat keterkaitan yang baik sehingga rnudah dalarn rnengukur, rnengevaluasi dan rnenilai kinerja;	Melaksanakan Koordinasi dengan Bappeda terkait Indikator Kinerja Utama (IKU) Sekretariat Daerah	Laporan Hasil Riviui Indikator Kinerja Utama (IKU) Sekretariat Daerah

No.	Rekomendasi	Tindak Lanjut/ Rencana Aksi	Progres Atas Rencana Aksi
5	Melaksanakan evaluasi mandiri terhadap penyelenggaraan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah secara memadai sesuai dengan Peraturan Gubernur Banten Nomor 33 Tahun 2022 tentang Pedoman Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Provinsi Banten.	1. Membentuk Tim Evaluasi Mandiri AKIP Sekretariat Daerah Tahun 2022 2. Melaksanakan Evaluasi Mandiri AKIP Sekretariat Daerah Tahun 2022	1. SK Tim Evaluasi Mandiri AKIP Sekretariat Daerah Tahun 2022 2. Berita Acara Penilaian hasil Evaluasi Mandiri AKIP Sekretariat Daerah tahun 2022 dengan nilai 66,25

1.9 Sistematika Penyusunan Laporan Kinerja Sekretariat Daerah Provinsi Banten mengacu pada beberapa dasar hukum sebagai berikut:

Sistematika Penyusunan Laporan Kinerja Sekretariat Daerah Provinsi Banten tahun 2023 mengacu pada Peraturan Kementrian PAN RB RI Nomor : 53 Tahun 2014 tentang petunjuk teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Review atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini disajikan penjelasan umum organisasi, dengan penekanan kepada aspek strategis organisasi serta permasalahan utama (strategic issued) yang sedang dihadapi organisasi.

BAB II PERENCANAAN KINERJA

Bab ini diuraikan ringkasan/ikhtisar perjanjian kinerja tahun yang bersangkutan.

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

a. Capaian Kinerja Organisasi

Capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis Organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi. Untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis tersebut dilakukan analisis capaian kinerja sebagai berikut:

1. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun 2023;
 2. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun 2023 dengan tahun 2022;
 3. Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun 2023 dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi;
 4. Perbandingan Antara Realisasi Kinerja Sekretariat Daerah Tahun 2023 dengan Standar Nasional
 5. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan;
 6. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya;
 7. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja).
- b. Realisasi Anggaran

Bab ini diuraikan realisasi anggaran yang digunakan dan yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja.

BAB IV PENUTUP

Pada bab ini diuraikan simpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya

Lampiran

2.1 Rencana Strategis 2023-2026

Sebagai sebuah Instansi Sektor Publik, Pemerintah Provinsi Banten mempunyai Rencana Strategis yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 4 (empat) tahun, yaitu tahun 2023-2026 dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang ada atau mungkin timbul/rencana strategis Pemerintah Provinsi Banten yang mencakup Visi/Misi Prioritas Daerah, tujuan, sasaran serta cara pencapaian tujuan dan sasaran tersebut akan diuraikan di bab ini.

2.1.1 Visi Pemerintah Provinsi Banten

Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Banten 2023-2026, berpijak pada kondisi saat ini dan tantangan yang diproyeksikan dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Banten 2005-2025, serta mempertimbangkan potensi yang dimiliki dan harapan luhur masyarakat Provinsi Banten, yaitu visi Pembangunan Provinsi Banten 2005-2025.

Visi yaitu menggambarkan arah pembangunan dan kondisi masa depan, dalam Visi Provinsi Banten yang akan dicapai selama empat tahun mendatang (2023-2026) sesuai dengan visi pembangunan Banten tahun 2005-2025, yaitu:

"BANTEN MANDIRI, MAJU, SEJAHTERA BERLANDASKAN IMAN DAN TAQWA"

2.1.2 Misi Pemerintah Provinsi Banten

Misi adalah pernyataan tentang upaya yang harus dilakukan dalam usaha mewujudkan visi, misi juga akan memberikan arah sekaligus batasan proses pencapaian tujuan. Oleh karena itu untuk mewujudkan visi Provinsi Banten 2023-2026 tersebut akan ditempuh melalui 4 (empat) misi pembangunan daerah sebagai berikut:

- 1. Mewujudkan Masyarakat Sejahtera yang Berakhlak Mulia, Berbudaya, Sehat dan Cerdas**

- 2. Mewujudkan Perekonomian yang Maju dan Berdaya Saing secara Merata dan Berkeadilan**
- 3. Mewujudkan Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup yang Lestari**
- 4. Mewujudkan Penyelenggaraan Pemerintahan yang Baik, Bersih, dan Berwibawa.**

2.1.3 Tujuan Sekretariat Daerah Provinsi Banten

Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi pernyataan visi dan misi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam periode 1-4 tahun mendatang, agar diketahui apa yang harus dilaksanakan dengan mempertimbangkan sumber daya dan kemampuan yang dimiliki. Tujuan berdasarkan rumusan RPD (Rencana Pembangunan Daerah) Provinsi Banten tahun 2023-2026 dan Rencana Strategis Sekretariat Daerah Tahun 2023-2026 adalah:

1. Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik, Bersih dan Berwibawa;
2. Terwujudnya Akuntabilitas Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah pada perangkat Daerah;
3. Terwujudnya Peningkatan Kualitas Kebijakan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

2.1.4 Sasaran Sekretariat Daerah Provinsi Banten

Sasaran merupakan penjabaran dari tujuan yang telah diterapkan atau merupakan tujuan antara/dengan demikian tujuan akan tercapai apabila sasaran dapat terpenuhi dan berhasil.

Sasaran harus bersifat lebih spesifik, terukur, dapat dicapai dan memiliki jangka waktu pelaksanaan. Oleh karena itu dalam menetapkan sasaran memerlukan indikator kinerja yang secara terperinci tujuan dan sasarnya.

Sasaran yang akan dicapai oleh Sekretariat Daerah Provinsi Banten berdasarkan Perubahan Rencana Strategis Sekretariat

Daerah Provinsi Banten Tahun 2023-2026 adalah sebagai berikut:

1. Meningkatnya Penyelenggaraan Reformasi Birokrasi dengan indikator nilai indeks reformasi
2. Meningkatnya Akuntabilitas kinerja penyelenggaraan Pemerintahan dengan indikator nilai Capaian SAKIP Perangkat Daerah
3. Meningkatnya kualitas kelembagaan yang terukur dengan indikator nilai indeks kelembagaan
4. Meningkatnya Kepatuhan Pelayanan Publik dengan indikator nilai indeks kepatuhan pelayanan publik
5. Meningkatnya kualitas informasi kinerja Perangkat Daerah dengan indikator nilai komponen pelaporan SAKIP Provinsi
6. Meningkatnya Kualitas Kebijakan Daerah dengan indikator indeks kualitas kebijakan
7. Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pengadaan Barang dan Jasa yang baik dan bebas KKN dengan indikator Indeks Tata Kelola Pengadaan barang dan jasa
8. Meningkatnya kualitas kebijakan administrasi pembangunan dengan indikator Persentase rumusan administrasi pembangunan yang diimplementasikan
9. Meningkatnya Kerjasama dan penyelenggaraan administrasi pemerintahan dengan indikator Skoring/Nilai Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
10. Meningkatkan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat dengan indikator Persentase rumusan kebijakan kesejahteraan yang diimplementasikan
11. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Pimpinan Daerah dengan indikator Persentase realisasi pelayanan pimpinan daerah
12. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Setda dengan indikator Persentase realisasi pelayanan SETDA

2.2 Rencana Kerja Tahun 2023

Rencana kerja tahun 2023 mengacu pada target kinerja Perubahan Rencana Strategis Sekretariat Daerah Tahun 2023-2026, memiliki 12 sasaran dan 12 indikator yang diampu oleh 7 unit kerja di lingkungan

Sekretariat Daerah Provinsi Banten, Sasaran dan indikator kinerja beserta target Tahun 2023 seperti tabel 2.1 berikut :

Tabel 2.1
Target Kinerja Sekretariat Daerah Tahun 2023

NO	SASARAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET	UNIT KERJA
1	Meningkatnya Kualitas Kelembagaan yang terukur	Indeks kelembagaan	Nilai	41	Biro Organisasi dan Reformasi Birokrasi
2	Meningkatnya Kualitas Kebijakan Daerah	Indeks Kualitas Kebijakan	Nilai	60	Biro Hukum
3	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pengadaan Barang dan Jasa yang baik dan bebas KKN	Indeks Tata Kelola Pengadaan Barang dan Jasa	Persen	80,8	Biro Pengadaan Barang/Jasa dan LPSE
4	Meningkatnya Kepatuhan Pelayanan Publik	Kepatuhan Pelayanan Publik	Nilai	81,81	Biro Organisasi dan Reformasi Birokrasi
5	Meningkatnya Kulaitas Informasi Kinerja Perangkat Daerah	Nilai komponen pelaporan SAKIP Provinsi	Nilai	10,77	Biro Organisasi dan Reformasi Birokrasi
6	Meningkatnya Kualitas Kebijakan Perekonomian Daerah	Persentase realisasi rumusan Kebijakan Bidang Perekonomian Daerah yang di implementasikan	Persen	100	Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan
7	Meningkatnya Kualitas Kebijakan Administrasi Pembangunan	Persentase Realisasi Rumusan Kebijakan Administrasi Pembangunan yang diimplementasikan	Persen	100	Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan
8	Meningkatkan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	Persentase Realisasi Rumusan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat yang diimplementasikan	Persen	100	Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah
9	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Pimpinan Daerah	Persentase realisasi pelayanan Pimpinan Daerah	Persen	100	Biro Administrasi Pimpinan Dan Protokol
10	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Setda	Persentase realisasi pelayanan SETDA	Persen	100	Biro Umum Dan Perlengkapan
11	Meningkatnya Kerjasama dan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan	Skoring/Nilai Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Skor/ Nilai	4,24	Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah
12	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan	Capaian SAKIP Perangkat Daerah	Nilai	70	Semua Biro

Untuk menunjang pencapaian kinerja program dan kegiatan serta pendanaan yang dilaksanakan oleh Unit Kerja di lingkungan Sekretariat Daerah Provinsi Banten pada tahun anggaran 2023 adalah sebagai berikut :

a. Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah

Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah pada tahun 2023 sesuai dengan perubahan rencana kerja anggran 2023 mempunyai 3 program dan 11 kegiatan, yang didukung oleh APBD Provinsi Banten sejumlah Rp. **23.031.247.500,-** (Dua Puluh Tiga Milyar Tiga puluh Satu Juta Dua Ratus Lima Empat Puluh Tujuh Ribu Lima Ratus Rupiah) untuk mewujudkan kinerja yang telah diperjanjikan, rincian program dan kegiatan seperti pada tabel 2.2.

b. Biro Hukum

Biro Hukum pada tahun 2023 sesuai dengan perubahan rencana kerja anggran 2023 mempunyai 2 program dan 7 kegiatan, yang didukung oleh APBD Provinsi Banten sejumlah Rp. **3.292.050.000,-** (Tiga Milyar Dua Ratus Sembilan Puluh Dua Juta Lima Puluh Ribu Rupiah) untuk mewujudkan kinerja yang telah diperjanjikan, rincian program dan kegiatan seperti pada tabel 2.3.

c. Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan

Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan pada tahun 2023 sesuai dengan perubahan rencana kerja anggran 2023 mempunyai 3 program dan 9 kegiatan, yang didukung oleh APBD Provinsi Banten sejumlah Rp. **3.603.682.000** ,- (Tiga Milyar Enam Ratus Tiga Juta Enam Ratus Delapan Puluh Dua Ribu Rupiah) untuk mewujudkan kinerja yang telah diperjanjikan, rincian program dan kegiatan seperti pada tabel 2.4.

d. Biro Pengadaan Barang/Jasa dan LPSE

Biro Pengadaan Barang/Jasa dan LPSE pada tahun 2023 sesuai dengan perubahan rencana kerja anggran 2023 mempunyai 3 program dan 9 kegiatan, yang didukung oleh APBD Provinsi Banten sejumlah Rp. **4.080.785.485,-** (Empat Milyar Delapan Puluh Juta Tujuh Ratus Delapan Puluh Lima Ribu Empat Ratus Delapan Puluh Lima Rupiah) untuk mewujudkan kinerja yang telah diperjanjikan, rincian program dan kegiatan seperti pada tabel 2.5.

e. Biro Organisasi dan Reformasi Birokrasi

Biro Organisasi dan Reformasi Birokrasi pada tahun 2023 sesuai dengan perubahan rencana kerja anggran 2023 mempunyai 2 program dan 7 kegiatan, yang didukung oleh APBD Provinsi Banten sejumlah Rp. **2.773.092.000,-** (Dua Milyar Tujuh Ratus Tujuh Puluh Tiga Juta Sembilan Puluh Dua Ribu Rupiah) untuk mewujudkan kinerja yang telah diperjanjikan. Program dan Anggaran digunakan untuk mendukung capaian Sasaran, rincian program dan kegiatan seperti pada tabel 2.6.

f. Biro Administrasi Pimpinan dan Protokol

Biro Administrasi Pimpinan dan Protokol pada tahun 2023 sesuai dengan perubahan rencana kerja anggran 2023 mempunyai 1 program dan 7 kegiatan, yang didukung oleh APBD Provinsi Banten sejumlah Rp. **11.074.513.000,-** (Sebelas Milyar Tujuh Puluh Empat Juta Lima Ratus Tiga Belas Ribu Rupiah) untuk mewujudkan kinerja yang telah diperjanjikan, rincian program dan kegiatan seperti pada tabel 2.7.

g. Biro Umum dan Perlengkapan

Biro Biro Umum dan Perlengkapan pada tahun 2023 sesuai dengan perubahan rencana kerja anggran 2023 mempunyai 1 program dan 10 kegiatan, yang didukung oleh APBD Provinsi Banten sejumlah Rp. **200.205.899.215,-** (Dua Ratus Milyar Dua Ratus Lima Juta Delapan Ratus Sembilan Puluh Sembilan Ribu Dua Ratus Lima Belas Rupiah) untuk mewujudkan kinerja yang telah diperjanjikan, rincian program dan kegiatan seperti pada tabel 2.8.

Tabel 2.2

Rincian Program dan Kegiatan Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah

PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	TARGET 2023		PAGU INDIKATIF	
						Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	APBD 2023	P-RKPD 2023
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase Ketercapaian dari Seluruh Kegiatan pada Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi					100 Persen	100 Persen	4.210.000.000	3.163.612.200
		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Ketercapaian Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Sekretariat Daerah			100 Persen	100 Persen	210.000.000	138.222.200
				Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 Dokumen	1 Dokumen	120.000.000	48.222.200
				Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Jumlah Dokumen RKASKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	15.000.000	15.000.000
				Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	15.000.000	15.000.000
				Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPASKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	15.000.000	15.000.000
				Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	15.000.000	15.000.000
				Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Laporan	1 Laporan	15.000.000	15.000.000
				Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan	1 Laporan	15.000.000	15.000.000
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Ketercapaian Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			100 Persen	100 Persen	200.000.000	178.888.000
				Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	125.000.000	103.888.000
				Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	1 Dokumen	1 Dokumen	55.000.000	55.000.000
				Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	1 Laporan	1 Laporan	20.000.000	20.000.000
		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Ketercapaian Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			100 Persen	100 Persen	475.000.000	327.386.600
				Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	1 Unit	1 Unit	150.000.000	75.916.600
				Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	1 Paket	1 Paket	225.000.000	218.970.000
				Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	10 orang	4 orang	100.000.000	32.500.000
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Ketercapaian Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah			100 Persen	100 Persen	1.550.000.000	916.815.400
				Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	250.000.000	250.000.000
				Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	150.000.000	93.120.000
				Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	250.000.000	73.940.000

PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	TARGET 2023		PAGU INDIKATIF	
						Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	APBD 2023	P-RKPD 2023
				Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	1 Laporan	900.000.000	499.755.400
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Ketercapaian Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			100 Persen	100 Persen	1.775.000.000	1.602.300.000
				Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	1.775.000.000	1.602.300.000
PROGRAM PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH	Persentase Realisasi Kebijakan Pemerintahan dan Otonomi Daerah					100 Persen	100 Persen	3.350.000.000	2.761.309.400
		Pelaksanaan Tugas Pemerintahan	Ketercapaian Jumlah Dokumen Kegiatan Pelaksanaan Tugas Pemerintahan			100 Persen	100 Persen	1.100.000.000	838.275.000
				Pengelolaan Administrasi Kebijakan Pemerintahan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Kebijakan Pemerintahan	1 Dokumen	1 Dokumen	150.000.000	112.739.000
				Fasilitasi Pelaksanaan Pemerintahan Umum	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Pelaksanaan Pemerintahan Umum	2 Dokumen	2 Dokumen	250.000.000	300.000.000
				Fasilitasi Penataan Wilayah	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penataan Wilayah	3 Dokumen	3 Dokumen	700.000.000	425.536.000
		Pelaksanaan Otonomi Daerah	Persentase Ketercapaian Kegiatan Pelaksanaan Otonomi Daerah			100 Persen	100 Persen	1.250.000.000	1.113.034.400
				Fasilitasi Administrasi Kepala Daerah dan DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Administrasi Kepala Daerah dan DPRD	2 Dokumen	2 Dokumen	250.000.000	299.552.000
				Pengembangan Otonomi dan Penataan Urusan	Jumlah Dokumen Hasil Pengembangan Otonomi dan Penataan Urusan yang Dilaksanakan	3 Dokumen	3 Dokumen	400.000.000	335.682.000
				Evaluasi dan Penyelenggaraan Pemerintahan	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi dan Penyelenggaraan Pemerintahan	4 Laporan	4 Laporan	600.000.000	477.800.400
		Fasilitasi Kerja Sama Daerah	Persentase Ketercapaian Kegiatan Fasilitasi Kerja Sama Daerah			100 Persen	100 Persen	1.000.000.000	810.000.000
				Fasilitasi Kerja Sama Antar Pemerintah	Jumlah Kerja Sama Antar Pemerintah yang Difasilitasi	10 Dokumen	10 Dokumen	700.000.000	570.000.000
				Fasilitasi Kerja Sama Badan Usaha/Swasta	Jumlah Kerja Sama Badan Usaha/Swasta yang Difasilitasi	1 Dokumen	1 Dokumen	100.000.000	80.000.000
				Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama	Jumlah Kerja Sama yang Dievaluasi	2 Laporan	2 Laporan	200.000.000	160.000.000
PROGRAM KESEJAHTERAAN RAKYAT	Persentase Realisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat					100 Persen	100 Persen	19.480.000.000	17.106.325.900
		Fasilitasi Pembinaan Mental Spiritual	Persentase Ketercapaian Kegiatan Pembinaan Mental Spiritual			100 Persen	100 Persen	17.880.000.000	15.826.325.900
				Pengelolaan Sarana dan Prasarana Spiritual	Jumlah Sarana dan Prasarana Spiritual yang Dikelola	1 Unit	1 Unit	6.500.000.000	4.875.000.000
				Fasilitasi Kelembagaan Bina Spiritual	Jumlah Lembaga Bina Spiritual yang Difasilitasi	2 Lembaga	2 Lembaga	11.380.000.000	10.951.325.900
		Fasilitasi Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Pelayanan Dasar	Ketercapaian Jumlah Dokumen kegiatan Fasilitasi Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Pelayanan Dasar			100 Persen	100 Persen	900.000.000	720.000.000
				Fasilitasi, Koordinasi, Sinkronisasi, Evaluasi dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Pendidikan	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi, Koordinasi, Sinkronisasi, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Pendidikan	2 Dokumen	2 Dokumen	300.000.000	240.000.000
				Fasilitasi, Koordinasi dan Sinkronisasi, Evaluasi dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi, Koordinasi, Sinkronisasi, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Kesehatan	2 Dokumen	2 Dokumen	300.000.000	240.000.000
				Fasilitasi, Koordinasi dan Sinkronisasi, Evaluasi dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Sosial	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi, Koordinasi, Sinkronisasi, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Sosial	2 Dokumen	2 Dokumen	300.000.000	240.000.000
		Fasilitasi Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Non Pelayanan Dasar	Ketercapaian Jumlah Dokumen kegiatan Fasilitasi Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Non Pelayanan Dasar			100 Persen	100 Persen	700.000.000	560.000.000

PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	TARGET 2023		PAGU INDIKATIF	
						Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	APBD 2023	P-RKPD 2023
				Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Kepemudaan, Olahraga, Kebudayaan, dan Pariwisata	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Kepemudaan, Olahraga, Kebudayaan, dan Pariwisata	3 Dokumen	3 Dokumen	300.000.000	240.000.000
				Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Transmigrasi dan Tenaga Kerja	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Transmigrasi dan Tenaga Kerja	3 Dokumen	3 Dokumen	300.000.000	240.000.000
				Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Komunikasi, Informatika, Statistik, Persandian, dan Perhubungan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Komunikasi, Informatika, Statistik, Persandian, dan Perhubungan	1 Dokumen	1 Dokumen	100.000.000	80.000.000
Jumlah								27.040.000.000	23.031.247.500

Tabel 2.3

Rincian Program dan Kegiatan Biro Hukum

PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	TARGET 2023		PAGU INDIKATIF	
						Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	APBD 2023	P-RKPD 2023
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase Ketercapaian dari Seluruh Kegiatan pada Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi					100 Persen	100 Persen	659.272.800	604.006.800
		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Ketercapaian Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Sekretariat Daerah			100 Persen	100 Persen	176.995.600	135.638.000
				Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 Dokumen	1 Dokumen	21.020.000	11.094.800
				Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	5.611.200	5.611.200
				Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	5.611.200	5.611.200
				Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	4.384.800	2.584.800
				Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	4.384.800	2.584.800
				Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Laporan	1 Laporan	3.045.600	1.995.600
				Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan	1 Laporan	132.938.000	106.155.600
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Ketercapaian Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah (Biro Hukum)			100 Persen	100 Persen	4.014.000	4.014.000
				Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	1 Laporan	1.500.000	1.500.000
				Pengelolaan dan Penyajian Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	1 Dokumen	1 Dokumen	1.164.000	1.164.000
				Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuang Bulanan/ Triwulanan/Semesteran dan Laporan Koordinas Penyusunan Laporan K Bulanan/Triwulanan/Se SKPD	3 Laporan	3 Laporan	1.350.000	1.350.000
		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Ketercapaian Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah (Biro Hukum)			100 Persen	100 Persen	30.750.000	30.750.000
				Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	1 Paket	0 Paket		
				Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	1 Paket	1 Paket	30.750.000	30.750.000
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Ketercapaian Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah			100 Persen	100 Persen	224.914.800	211.006.400
				Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	99.835.900	97.256.500
				Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	79.005.900	63.459.900
				Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	1 Laporan	46.073.000	50.290.000

PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	TARGET 2023		PAGU INDIKATIF	
						Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	APBD 2023	P-RKPD 2023
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Ketercapaian Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			100 Persen	100 Persen	222.598.400	222.598.400
				Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	1 Laporan	1.430.400	1.430.400
				Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	1 Laporan	221.168.000	221.168.000
PROGRAM FASILITASI DAN KOORDINASI HUKUM	Persentase Dokumentasi Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum					100 Persen	100 Persen	3.265.727.200	2.688.043.200
	Persentase Ketercapaian Kualitas Fasilitasi dan Evaluasi Produk Hukum Kabupaten/Kota					100 Persen	100 Persen		
	Persentase Ketercapaian Kualitas Produk Hukum Provinsi dan Keselarasan Peraturan Perundang-undangan Daerah dengan Regulasi Hukum Nasional					100 Persen	100 Persen		
	Persentase Ketercapaian Kualitas Produk Hukum Provinsi dan Keselarasan Peraturan Perundang-undangan Daerah dengan Regulasi Hukum Nasional					100 Persen	100 Persen		
		Fasilitasi Penyusunan Perundang-undangan	Persentase Ketercapaian Kegiatan Fasilitasi Penyusunan Perundang-undangan			100 Persen	100 Persen	1.774.050.200	1.462.880.400
				Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Pengaturan	Jumlah Produk Hukum Pengaturan yang Disusun	30 Dokumen	30 Dokumen	818.131.800	624.527.000
				Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Penetapan	Jumlah Produk Hukum Penetapan yang Disusun	50 Dokumen	50 Dokumen	89.117.600	88.163.400
				Pendokumentasian Produk Hukum dan Naskah Hukum Lainnya	Jumlah Produk Hukum yang Didokumentasi dan Dikelola Informasinya	6 Dokumen	6 Dokumen	378.000.000	307.429.200
				Fasilitasi dan Evaluasi Produk Hukum Kabupaten/Kota	Jumlah Produk Hukum Kabupaten/Kota yang Difasilitasi dan Dievaluasi	60 Dokumen	60 Dokumen	488.800.800	442.760.800
		Fasilitasi Bantuan Hukum				40 kasus	40 kasus	1.491.677.000	1.225.162.800
				Fasilitasi Penyelesaian Masalah Hukum	Jumlah Masalah Hukum yang Diselesaikan	16 Kasus	16 Kasus	753.477.000	631.377.000
				Fasilitasi Penyelesaian Masalah Non Litigasi dan HAM	Jumlah Masalah Non Litigasi dan HAM yang Diselesaikan	34 Kasus	34 Kasus	738.200.000	593.785.800
Jumlah								3.925.000.000	3.292.050.000

Tabel 2.4

Rincian Program dan Kegiatan Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan

PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	TARGET 2023		PAGU INDIKATIF	
						Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	APBD 2023	P-RKPD 2023
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase Ketercapaian dari Seluruh Kegiatan pada Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi					100%	100%	2.358.929.749	2.192.396.349
		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase tersusunya dokumen Perencanaan, penganggaran dan evaluasi kierja perangkat daerah			100%	100%	63.840.000	63.840.000
				Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2	2	9.960.000	9.960.000
				Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2	2	11.160.000	11.160.000
				Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	2	2	8.660.000	8.660.000
				Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	2		6.160.000	6.160.000
				Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	2	2	5.000.000	5.000.000
				Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	12	12	6.620.000	6.620.000
				Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4	4	16.280.000	16.280.000
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase ketercapaian administrasi keuangan perangkat daerah			100%	100%	18.860.000	18.860.000
				Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	7.410.000	7.410.000
				Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	1.450.000	1.450.000
				Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	1 Dokumen	1 Dokumen	2.825.000	2.825.000
				Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	4.350.000	4.350.000
				Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Tersedianya Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1 Dokumen	1 Dokumen	2.825.000	2.825.000
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase ketercapaian Administrasi Umum perangkat daerah			100%	100%	612.675.749	490.896.509
				Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	196.827.000	196.827.000
				Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	15.097.000	15.097.000
				Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	247.400.000	138.000.000
				Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	39.827.749	34.278.509
				Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	1 Laporan	108.524.000	101.694.000

PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	TARGET 2023		PAGU INDIKATIF	
						Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	APBD 2023	P-RKPD 2023
				Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	5.000.000	5.000.000
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase tersusunya laporan jasa penunjang urusan pemerinthan daerah			100%	100%	1.663.554.000	1.618.799.840
				Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	24.000.000	23.500.000
				Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	1.639.554.000	1.595.299.840
PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	Persentase tersedianya Perumusan Kebijakan Sarana Perekonomian					100%	100%	1.191.070.251	795.580.251
	Persentase tersedianya Perumusan Kebijakan Industri Jasa dan Ketenagakerjaan								
	Persentase Tersedianya Perumusan Kebijakan Produksi Daerah								
		Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi Perekonomian	Persentase Ketercapaian Kegiatan Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi Perekonomian			100%	100%	364.652.000	244.408.000
				Fasilitasi Pengelolaan Kebijakan Ekonomi Makro	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Kebijakan Ekonomi Makro	3 Dokumen	3 Dokumen	180.000.000	84.656.000
				Fasilitasi Pengelolaan Kebijakan Ekonomi Mikro	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Kebijakan Ekonomi Mikro	3 Dokumen	3 Dokumen	184.652.000	159.752.000
		Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi Sumber Daya Alam	Persentase Ketercapaian Kegiatan Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi Sumber Daya Alam			100%	100%	411.070.251	193.924.251
				Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan	7 Dokumen	4 Dokumen	231.070.251	116.956.251
				Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan dan Lingkungan Hidup	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan dan Lingkungan Hidup	2 Dokumen	2 Dokumen	180.000.000	76.968.000
		Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi BUMD dan BLUD	Persentase Ketercapaian Kegiatan Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi BUMD dan BLUD			100%	100%	415.348.000	357.248.000
				Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring, dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah Jasa Keuangan dan Aneka Usaha	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring, dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Usaha Miliik Daerah Jasa Keuangan dan Aneka Usaha	2 Dokumen	2 Dokumen	126.745.500	110.145.500
				Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah Air Minum, Limbah dan Sanitasi	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring, dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah Air Minum, Limbah dan Sanitasi	2 Dokumen	2 Dokumen	142.824.500	117.924.500
				Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Layanan Umum Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring, dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Layanan Umum Daerah	2 Dokumen	2 Dokumen	145.778.000	129.178.000
PROGRAM KEBIJAKAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN	Persentase Tersedianya perumusan kebijakan Administrasi Pembangunan					100%	100%	1.000.000.000	615.705.400
	Persentase Tersedianya dokumen Hasil rekomendasi pengendalian Administrasi Pembangunan sebagai bahan evaluasi								

PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	TARGET 2023		PAGU INDIKATIF	
						Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	APBD 2023	P-RKPD 2023
		Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Persentase Ketercapaian Kegiatan Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah			100%	100%	550.000.000	302.694.000
				Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan APBD	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan APBD	3 Dokumen	3 Dokumen	250.000.000	118.556.000
				Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan APBN	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan APBN	2 Dokumen	2 Dokumen	150.000.000	77.456.000
				Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Wilayah	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Wilayah	2 Dokumen	2 Dokumen	150.000.000	106.682.000
		Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Persentase Ketercapaian Kegiatan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Daerah			100%	100%	450.000.000	313.011.400
				Analisis Capaian Kinerja Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Analisis Capaian Kinerja Pembangunan Daerah yang Disediakan	4 Dokumen	4 Dokumen	100.000.000	65.600.000
				Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pembangunan Daerah	2 Dokumen	2 Dokumen	150.000.000	75.886.000
				Fasilitasi Perumusan Kebijakan Teknis Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Perumusan Kebijakan Teknis Pembangunan Daerah	2 Dokumen	2 Dokumen	200.000.000	171.525.400
								4.550.000.000	3.603.682.000

Tabel 2.5

Rincian Program dan Kegiatan Biro Pengadaan Barang/Jsa dan LPSE

PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	TARGET 2023		PAGU INDIKATIF	
						Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	APBD 2023	P-RKPD 2023
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase Ketercapaian dari Seluruh Kegiatan pada Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi					100 Persen	100 Persen	2.403.940.000	2.390.043.000
		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Ketercapaian Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Sekretariat Daerah (Biro Pengadaan Barang/Jasa dan Layanan Pengadaan Secara Elektronik)			100 Persen	100 Persen	59.850.000	53.416.200
				Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	2 Dokumen	4.000.000	3.656.400
				Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2 Dokumen	2 Dokumen	9.700.000	9.700.000
				Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	2 Dokumen	2 Dokumen	10.200.000	10.200.000
				Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	2 Dokumen	2 Dokumen	4.750.000	4.750.000
				Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	2 Dokumen	2 Dokumen	5.200.000	5.200.000
				Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	12 Laporan	12 Laporan	20.687.500	16.696.200
				Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3 Laporan	3 Laporan	5.312.500	3.213.600
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Ketercapaian Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah (Biro Pengadaan Barang/Jasa dan Layanan Pengadaan Secara Elektronik)			100 Persen	100 Persen	10.500.000	10.500.000
				Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	12 Dokumen	12 Dokumen	1.500.000	1.500.000
				Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	umlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	1 Laporan	600.000	600.000
				Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	1 Dokumen	1 Dokumen	2.150.000	2.150.000
				Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	18 Laporan	18 Laporan	5.250.000	5.250.000
				Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1 Dokumen	1 Dokumen	1.000.000	1.000.000
		Administrasi Kepegawaian	Persentase Ketercapaian Kegiatan Administrasi Kepegawaian			100 Persen	100 Persen	101.795.000	111.679.000

PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	TARGET 2023		PAGU INDIKATIF	
						Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	APBD 2023	P-RKPD 2023
		Perangkat Daerah	perangkat daerah (Biro Pengadaan Barang/Jasa dan Layanan Pengadaan Secara Elektronik)						
				Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	0 Paket	0 Paket	9.020.000	-
				Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	10 Orang	10 Orang	68.477.000	96.305.000
				Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	40 Orang	40 Orang	24.298.000	15.374.000
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Ketercapaian Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah (Biro Pengadaan Barang/Jasa dan Layanan Pengadaan Secara Elektronik)			100 Persen	100 Persen	389.795.000	321.947.800
				Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	191.555.000	148.286.100
				Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	10.000.000	10.000.000
				Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	33.000.000	34.629.000
				Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	25.000.000	24.957.000
				Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	1 Laporan	125.240.000	104.075.700
				Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	0 Dokumen	0 Dokumen	5.000.000	-
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Ketercapaian Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (Biro Pengadaan Barang/Jasa dan Layanan Pengadaan Secara Elektronik)			100 Persen	100 Persen	1.842.000.000	1.892.500.000
				Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	umlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	24.000.000	36.500.000
				Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	1.818.000.000	1.856.000.000
PROGRAM KEBIJAKAN DAN PELAYANAN PENGADAAN BARANG DAN JASA	A. Pemanfaatan Sistem Pengadaan B. Tingkat Kematangan UKPBJ C. Kualifikasi dan Kompetensi SDM PBJ					30,00 Nilai 26,67 Nilai 24,13 Nilai	30,00 Nilai 26,67 Nilai 24,13 Nilai	1.950.224.285	1.690.742.485
		Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Persentase Ketercapaian Kegiatan Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa			100 Persen	100 Persen	491.848.000	418.242.900
				Pengelolaan Strategi Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Laporan Hasil Strategi Pengadaan Barang dan Jasa	2 Laporan	2 Laporan	140.000.000	193.019.000
				Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa	1 Laporan	1 Laporan	215.355.000	146.861.900
				Pemantauan dan Evaluasi Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Laporan Hasil Pemantauan dan Evaluasi Pengadaan Barang dan Jasa	2 Laporan	2 Laporan	136.493.000	78.362.000
		Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik	Persentase Ketercapaian Kegiatan Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik			100 Persen	100 Persen	1.002.912.000	954.912.000
				Pengelolaan Sistem Pengadaan secara Elektronik	Jumlah Laporan Pengelolaan Sistem Pengadaan Secara Elektronik	1 Laporan	1 Laporan	552.912.000	656.166.000
				Pengembangan Sistem Informasi Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Laporan Pengembangan Sistem Informasi Pengadaan Barang dan Jasa	1 Laporan	1 Laporan	160.000.000	192.326.000
				Pengelolaan Informasi Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Laporan Pengelolaan Informasi Pengadaan Barang dan Jasa	1 Laporan	1 Laporan	290.000.000	106.420.000

PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	TARGET 2023		PAGU INDIKATIF	
						Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	APBD 2023	P-RKPD 2023
		Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	Persentase Ketercapaian Kegiatan Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa			100 Persen	100 Persen	455.464.285	317.587.585
				Pembinaan Sumber Daya Manusia Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Sumber Daya Manusia Pengadaan Barang dan Jasa	40 Orang	40 Orang	195.464.285	79.214.685
				Pembinaan Kelembagaan Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Dokumen Hasil Penataan Kelembagaan Pengadaan Barang dan Jasa	1 Dokumen	1 Dokumen	105.000.000	126.660.900
				Pendampingan, Konsultasi, dan/atau Bimbingan Teknis Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Pendampingan, Konsultasi, dan/atau Bimbingan Teknis Pengadaan Barang dan Jasa	1 Dokumen	1 Dokumen	155.000.000	111.712.000
Jumlah								4.354.164.285	4.080.785.485

Tabel 2.6

Rincian Program dan Kegiatan Biro Organisasi dan Reformasi Birokrasi

PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	TARGET 2023		PAGU INDIKATIF	
						Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	APBD 2023	P-RKPD 2023
ROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	<i>Persentase Ketercapaian dari Seluruh Kegiatan pada Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi</i>					100 persen	100 persen	645.634.000	609.268.000
		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	<i>Persentase Ketercapaian Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</i>			100 persen	100 persen	15.650.000	10.650.000
				Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	<i>Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)</i>	1 Dokumen	1 Dokumen	900.000	900.000
				Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	<i>Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dokumen)</i>	1 Dokumen	1 Dokumen	5.000.000	2.980.000
				Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	<i>Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD (Dokumen)</i>	1 Dokumen	1 Dokumen	5.000.000	2.980.000
				Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	<i>Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD (Dokumen)</i>	1 Dokumen	1 Dokumen	450.000	450.000
				Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	<i>Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD (Dokumen)</i>	1 Dokumen	1 Dokumen	2.500.000	1.540.000
				Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	<i>Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)</i>	1 Dokumen	1 Dokumen	900.000	900.000
				Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	<i>Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)</i>	1 Dokumen	1 Dokumen	900.000	900.000
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	<i>Persentase Ketercapaian Kegiatan Administrasi Keuangan perangkat daerah</i>			100 persen	100 persen	4.500.000	4.500.000
				Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	<i>Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (Dokumen)</i>	1 Dokumen	1 Dokumen	900.000	900.000
				Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	<i>Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD (Dokumen)</i>	1 Dokumen	1 Dokumen	900.000	900.000
				Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	<i>Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)</i>	1 Laporan	1 Laporan	900.000	900.000
				Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	<i>Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (Laporan)</i>	1 Laporan	1 Laporan	900.000	900.000

PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	TARGET 2023		PAGU INDIKATIF	
						Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	APBD 2023	P-RKPD 2023
				Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	<i>Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran (Dokumen)</i>	1 Dokumen	1 Dokumen	900.000	900.000
		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	<i>Persentase Ketercapaian Kegiatan Administrasi Kepegawaian perangkat daerah</i>			100 persen	100 persen	77.300.000	95.076.000
				Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	<i>Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai (Unit)</i>	1 unit	1 unit	4.300.000	4.300.000
				Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	<i>Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang)</i>	6 orang	6 orang	73.000.000	90.776.000
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Ketercapaian Kegiatan Administrasi Umum perangkat daerah			100 persen	100 persen	184.032.300	159.640.300
				Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	<i>Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)</i>	1 paket	1 paket	58.432.300	58.432.300
				Penyediaan Bahan Logistik Kantor	<i>Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)</i>	1 paket	1 paket	70.000.000	58.000.000
				Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	<i>Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)</i>	1 paket	1 paket	11.500.000	9.838.000
				Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	<i>Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)</i>	1 Laporan	1 Laporan	38.700.000	28.420.000
				Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	<i>Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD (Dokumen)</i>	1 Dokumen	1 Dokumen	4.500.000	4.500.000
				Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	<i>Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD (Dokumen)</i>	1 Dokumen	1 Dokumen	900.000	450.000
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	<i>Persentase Ketercapaian Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i>			100 persen	100 persen	364.151.700	339.401.700
				Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)</i>	13 Laporan	13 Laporan	364.151.700	339.401.700
PROGRAM PENATAAN ORGANISASI	<i>Persentase cakupan kegiatan akuntabilitas Kinerja</i>					100 persen	100 persen	2.819.183.000	2.163.824.000
	<i>Persentase cakupan kegiatan kelembagaan dan analisis jabatan</i>					100 persen	100 persen		
	<i>Persentase cakupan kegiatan Ketatalaksanaan dan pelayanan publik</i>					100 persen	100 persen		
	<i>Persentase cakupan kegiatan reformasi dan Budaya Kerja</i>					100 persen	100 persen		
		Fasilitasi Kelembagaan dan Analisis Jabatan	<i>Persentase Ketercapaian Kegiatan Fasilitasi Kelembagaan dan Analisis Jabatan</i>			100 persen	100 persen	1.575.000.000	1.098.426.000
				Fasilitasi Penataan Kelembagaan Provinsi	<i>Jumlah Dokumen Hasil Penataan Kelembagaan Kabupaten/Kota (Dokumen)</i>	2 Dokumen	2 Dokumen	555.000.000	363.868.000
				Fasilitasi Penataan Kelembagaan Kabupaten/Kota	<i>Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penataan Kelembagaan Kabupaten/Kota (Dokumen)</i>	1 Dokumen	1 Dokumen	420.000.000	300.000.000
				Penataan Analisis Jabatan	<i>Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Analisis Jabatan, Analisis Beban Kerja, dan Evaluasi</i>	2 Dokumen	2 Dokumen	600.000.000	434.558.000

PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	TARGET 2023		PAGU INDIKATIF	
						Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	APBD 2023	P-RKPD 2023
					<i>Jabatan (Dokumen)</i>				
		Fasilitasi Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja	<i>Persentase Ketercapaian Kegiatan Fasilitasi Reformasi Birokrasi dan Kauntabilitas Kinerja</i>			100 persen	100 persen	1.244.183.000	1.065.398.000
				Pembinaan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	<i>Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (Dokumen)</i>	2 Dokumen	2 Dokumen	220.000.000	251.665.000
				Monitoring dan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja	<i>Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja (Dokumen)</i>	2 Dokumen	2 Dokumen	200.000.000	136.812.000
				Evaluasi Pelaksanaan Budaya Kerja	<i>Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Pelaksanaan Budaya Kerja (Laporan)</i>	3 Laporan	3 Laporan	236.337.000	193.797.000
				Pengelolaan Tatalaksana Pemerintahan	<i>Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Tata Laksana Pemerintahan (Dokumen)</i>	3 Dokumen	3 Dokumen	337.500.000	238.924.000
				Fasilitasi Peningkatan Pelayanan Publik	<i>Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Peningkatan Pelayanan Publik (Dokumen)</i>	3 Dokumen	3 Dokumen	250.346.000	244.200.000
Jumlah								3.464.817.000	2.773.092.000

Tabel 2.7

Rincian Program dan Kegiatan Biro Administrasi Pimpinan dan Protokol

PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	TARGET 2023		PAGU INDIKATIF	
						Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	APBD 2023	P-RKPD 2023
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase Ketercapaian dari Seluruh Kegiatan pada Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi					100%	100%	6.968.141.000	5.834.427.100
	Persentase capaian Fasilitas Materi dan Komunikasi Pimpinan					100%	100%	4.636.653.000	3.643.033.000
	Persentase Capaian Pelayanan Keprotokolan					100%	100%	2.750.000.000	1.597.052.900
		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Ketercapaian Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Sekretariat Daerah			100%	100%	730.500.000	446.294.000
				Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	2 Dokumen	190.000.000	89.655.000
				Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2 Dokumen	2 Dokumen	17.000.000	7.550.800
				Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	2 Dokumen	2 Dokumen	17.000.000	7.570.000
				Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	2 Dokumen	2 Dokumen	7.000.000	7.490.000
				Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	2 Dokumen	2 Dokumen	7.000.000	7.490.800
				Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	12 Laporan	12 Laporan	316.500.000	276.303.400
				Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 Laporan	4 Laporan	176.000.000	50.234.000
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Ketercapaian Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah					55.380.000	55.380.000
				Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	12 Dokumen	12 Dokumen	10.000.000	10.000.000
				Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	1 Laporan	5.370.000	5.370.000
				Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	1 Dokumen	1 Dokumen	5.000.000	5.000.000
				Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	18 Laporan	18 Laporan	32.890.000	32.890.000
				Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1 Dokumen	1 Dokumen	2.120.000	2.120.000
		Administrasi Kepegawaian	Persentase Ketercapaian Kegiatan Kepegawaian Perangkat Daerah			100%	100%	1.428.628.000	1.235.132.400

PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	TARGET 2023		PAGU INDIKATIF	
						Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	APBD 2023	P-RKPD 2023
		Perangkat Daerah							
				Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	4 Paket	3 Paket	734.726.000	561.076.000
				Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	12 Dokumen	12 Dokumen	227.792.000	207.946.400
				Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	42 Orang	42 Orang	466.110.000	466.110.000
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Ketercapaian Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah			100%	100%	104.688.500	104.688.500
				Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 Dokumen	1 Dokumen	10.000.000	10.000.000
				Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	4 Dokumen	4 Dokumen	94.688.500	94.688.500
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Ketercapaian Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			100%	100%	4.648.944.500	3.992.932.200
				Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Bulan	12 Bulan	4.648.944.500	3.992.932.200
		Fasilitasi Materi dan Komunikasi Pimpinan	Persentase Ketercapaian Kegiatan Fasilitasi Materi dan Komunikasi Pimpinan			100%	100%	4.636.653.000	3.643.033.000
				Penyiapan Materi Pimpinan	Jumlah Dokumen Materi Pimpinan yang Disiapkan	12 Dokumen	12 Dokumen	690.000.000	460.000.000
				Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	12 Laporan	12 Laporan	2.396.653.000	1.926.373.000
				Pengelolaan Dokumentasi Pimpinan	Jumlah Laporan Pengelolaan Dokumentasi Pimpinan	12 Laporan	12 Laporan	1.550.000.000	1.256.660.000
		Fasilitasi Keprotokolan	Persentase Ketercapaian Kegiatan Fasilitasi Keprotokolan			100%	100%	2.750.000.000	1.597.052.900
				Fasilitasi dan Koordinasi Pelaksanaan Acara	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi dan Koordinasi Pelaksanaan Acara	12 Laporan	12 Laporan	1.100.000.000	750.000.000
				Fasilitasi Kunjungan Tamu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Kunjungan Tamu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	12 Laporan	12 Laporan	825.000.000	379.927.900
				Pengelolaan Hubungan Keprotokolan	Jumlah Laporan Pengelolaan Hubungan Keprotokolan	12 Laporan	12 Laporan	825.000.000	467.125.000
Jumlah								14.354.794.000	11.074.513.000

Tabel 2.8

Rincian Program dan Kegiatan Biro Umum dan Perlengkapan

PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	TARGET 2023		PAGU INDIKATIF	
						Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	APBD 2023	P-RKPD 2023
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase Ketercapaian dari Seluruh Kegiatan pada Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Ketercapaian Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Sekretariat Daerah			100 Persen	100 Persen	202.104.224.715	200.205.899.215
						100 Persen	100 Persen	81.718.000	97.718.000
				Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 Dokumen	1 Dokumen	11.000.000	19.000.000
				Kordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	16.000.000	16.000.000
				Kordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	16.000.000	16.000.000
				Kordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	9.000.000	9.000.000
				Kordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	9.000.000	9.000.000
				Kordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Laporan	1 Laporan	10.000.000	10.000.000
				Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan	1 Laporan	10.718.000	18.718.000
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Ketercapaian Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			100 Persen	100 Persen	110.214.478.287	101.688.238.000
				Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	446 Orang/Bulan	446 Orang/Bulan	107.426.700.287	99.445.000.000
				Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 Dokumen	1 Dokumen	2.279.070.000	1.878.530.000
				Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	450.000.000	306.000.000
				Kordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	2 Laporan	2 Laporan	11.750.000	11.750.000
				Kordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	2 Laporan	2 Laporan	20.790.000	20.790.000
				Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	1 Dokumen	1 Dokumen	2.500.000	2.500.000
				Kordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	12 Laporan	12 Laporan	20.068.000	20.068.000
				Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Laporan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1 Laporan	1 Laporan	3.600.000	3.600.000
		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Ketercapaian Kegiatan Kepegawaian Perangkat Daerah			100 Persen	100 Persen	113.036.000	92.894.000

PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	TARGET 2023		PAGU INDIKATIF	
						Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	APBD 2023	P-RKPD 2023
				Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	2 Dokumen	2 Dokumen	36.900.000	30.600.000
				Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	2 Dokumen	2 Dokumen	35.000.000	32.228.000
				Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	1 Laporan	13.200.000	13.200.000
				Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	1 Laporan	27.936.000	16.866.000
		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Ketercapaian Kegiatan Kepegawaian Perangkat Daerah			100 Persen	100 Persen	709.000.000	489.000.000
				Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	40 Orang	17 Orang	305.000.000	85.000.000
				Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	53 Orang	53 Orang	404.000.000	404.000.000
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Ketercapaian Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah			100 Persen	100 Persen	15.971.264.666	18.683.599.866
				Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	550.807.000	550.807.000
				Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	946.859.000	1.118.039.000
				Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	273.839.300	324.314.300
				Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	2.516.150.366	2.827.070.366
				Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	695.042.000	825.554.000
				Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 Dokumen	1 Dokumen	50.000.000	50.000.000
				Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1 Laporan	1 Laporan	8.317.692.000	10.956.777.800
				Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	1 Laporan	2.200.000.000	1.537.662.400
				Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	420.875.000	493.375.000
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Ketercapaian dari Seluruh Kegiatan pada Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi			100 Persen	100 Persen	7.758.314.715	7.290.400.915
				Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	3 Unit	5 Unit	155.000.000	1.118.754.500
				Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	322.996.100	422.996.100
				Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	283 Unit	373 Unit	7.199.353.615	5.748.550.315
				Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	1 Unit	80.965.000	100.000
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Ketercapaian dari Seluruh Kegiatan pada Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi			100 Persen	100 Persen	24.535.709.420	24.954.270.855
				Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	1 Laporan	200.000.000	200.000.000
				Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	1 Laporan	3.100.200.000	3.350.200.000
				Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Laporan	1 Laporan	2.404.618.000	2.704.618.000
				Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	1 Laporan	18.830.891.420	18.699.452.855
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Capaian Fasilitasi Tata Usaha			100 Persen	100 Persen	17.930.732.020	21.120.777.020

PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	TARGET 2023		PAGU INDIKATIF	
						Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	APBD 2023	P-RKPD 2023
				Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	22 Unit	22 Unit	1.185.740.000	1.315.540.000
				Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	200 Unit	200 Unit	4.873.574.820	7.214.264.820
				Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	329 Unit	329 Unit	93.750.000	93.750.000
				Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	371 Unit	371 Unit	375.432.000	885.432.000
				Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara	2 Unit	2 Unit	100.000.000	100.000.000
				Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Paket	1 Paket	2.764.082.200	3.084.622.200
				Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	5 Unit	5 Unit	8.197.180.000	8.197.180.000
				Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Paket	1 Paket	340.973.000	229.988.000
		Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Persentase capaian tata kelola keuangan dan aset SETDA			100 Persen	100 Persen	14.701.588.677	14.956.457.429
				Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	1 Orang/Bulan	1 Orang/Bulan	11.361.653.677	12.176.018.429
				Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	814.150.000	814.150.000
				Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	2 Orang	2 Orang	120.000.000	120.000.000
				Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	1 Orang/Bulan	1 Orang/Bulan	2.405.785.000	1.846.289.000
		Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah	Persentase capaian layanan rumah tangga pimpinan daerah dan fasilitas layanan SETDA			100 Persen	100 Persen	10.088.382.930	10.832.543.130
				Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	7.365.906.930	8.115.906.930
				Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	2.722.476.000	2.716.636.200
Jumlah								202.104.224.715	200.205.899.215

2.3 Penjanjian Kinerja

Perjanjian Kinerja adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Penyusunan dokumen Perjanjian Kinerja harus memperhatikan RPD, Rencana Strategis Perangkat Daerah, Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah, dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran.

Pejabat eselon II, III, dan IV wajib membuat dokumen Perjanjian Kinerja paling lambat satu bulan setelah Dokumen Pelaksanaan Anggaran ditetapkan. Dokumen Perjanjian Kinerja eselon II memuat sasaran strategis, indikator kinerja, target kinerja, program dan anggaran. Dokumen Perjanjian Kinerja eselon III memuat program, indikator program, target, kegiatan, dan anggaran. Dokumen Perjanjian Kinerja eselon IV memuat kegiatan, output, target, dan anggaran.

Pada tahun anggran 2023 Perjanjian Kinerja Sekretaris Daerah dan Perjanjian Kinerja Kepala Biro mengalami perubahan namun perubahan tersebut hanya terjadi pada besaran anggaran dikarenakan adanya optimalisasi anggaran, dengan tidak merubah target kinerja yang harus dicapai sesuai dengan Perjanjian Kenerja Anggaran Murni, pada beberapa kegiatan anggaran mengalami penurunan atau penambahan yang disesuaikan dengan kebutuhan serta penyesuaian dengan kebijakan-kebijakan yang berkembang (Perjanjian Kinerja Murni dan Perjanjian Kinerja Perubahan Terlampir).

Sehubungan pada Perubahan Perjanjian Kinerja Sekretaris Daerah Tahun 2023, Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Sekretaris Daerah merupakan Indikator Makro (Program, Kegiatan dan Pendanaannya dilaksanakan oleh Organisasi Perangkat Daerah Teknis), maka Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Sekretariat Daerah Provinsi Banten Tahun 2023 menyajikan Perjanjian Kinerja Para Kepala Biro dilingkungan Sekretariat Daerah Provinsi Banten

Berikut perbandingan Target Kinerja Anggaran Murni dengan Target Kinerja Anggaran Perubahan Tahun 2023 pada Perjanjian Kinerja para Kepala Biro dilingkungan Sekretariat Daerah Provinsi Banten seperti pada Tabel 2.9 berikut :

Tabel 2.9
Perjanjian Kinerja Murni dan Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun Anggaran 2023
Kepala Biro dilingkungan Sekretariat Daerah Provinsi Banten

1. Kepala Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target Murni	Target Perubahan
1	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan	Capaian SAKIP (Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah) Perangkat Daerah (Setda)	Nilai	70-80	70-80
2	Meningkatnya Kerjasama dan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan	Skoring/Nilai Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Nilai	4,24	4,24
3	Meningkatkan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	Persentase Realisasi Rumusan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat yang diimplementasikan	%	100	100

No	Program	Anggaran		Selisih	Keterangan
		Murni	Perubahan		
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	4.210.000.000	3.163.612.200	(1.046.387.800)	Berkurang
2	Program Pemerintahan dan Otonomi Daerah	3.350.000.000	2.761.309.400	(588.690.600)	Berkurang
3	Program Kesejahteraan Rakyat	19.480.000.000	17.106.325.900	(2.373.674.100)	Berkurang
Jumlah		27.040.000.000	23.031.247.500	(4.008.752.500)	Berkurang

Keterangan : Target Kinerja tetap, Perubahan pengurangan pagu anggaran

2. Kepala Biro Hukum

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target Murni	Target Perubahan
1	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan	Capaian SAKIP (Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah) Perangkat Daerah (Setda)	Nilai	70-80	70-80
2	Meningkatnya Kualitas Kebijakan Daerah	Indeks Kualitas Kebijakan	Nilai	60	60

No	Program	Anggaran		Selisih	Keterangan
		Murni	Perubahan		
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	659.272.800	604.006.800	(55.266.000)	Berkurang
2	Program Fasilitasi dan Koordinasi Hukum	3.265.727.200	2.688.043.200	(577.684.000)	Berkurang
Jumlah		3.925.000.000	3.292.050.000	(632.950.000)	Berkurang

Keterangan : Target Kinerja tetap, Perubahan pengurangan anggaran

3. Kepala Biro Pengadaan Barang / Jasa dan LPSE

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target Murni	Target Perubahan
1	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan	Capaian SAKIP (Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah) Perangkat Daerah (Setda)	Nilai	70-80	70-80
2	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pengadaan Barang dan Jasa yang baik dan bebas KKN	Indek Tata Kelola Pengadaan Barang/Jasa	Nilai	80,8	80,8

No	Program	Anggaran		Selisih	Keterangan
		Murni	Perubahan		
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	2.403.940.000	2.390.043.000	(13.897.000)	Berkurang
2	Program Kebijakan dan Pelayanan Pengadaan Barang	1.950.224.285	1.690.742.485	(259.481.800)	Berkurang
Jumlah		4.354.164.285	4.080.785.485	(273.378.800)	Berkurang

Keterangan : Target Kinerja tetap, Perubahan pengurangan anggaran

4. Kepala Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target Murni	Target Perubahan
1	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan	Capaian SAKIP (Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah) Perangkat Daerah (Setda)	Nilai	70-80	70-80
2	Meningkatnya Kualitas Kebijakan Perekonomian Daerah	Persentase Realisasi Rumusan Kebijakan Bidang Perekonomian Daerah yang di Implementasikan	%	100	100
3	Meningkatnya Kualitas Kebijakan Administrasi Pembangunan	Persentase Realisasi Rumusan Kebijakan Administrasi Pembangunan yang di Implementasikan	%	100	100

No	Program	Anggaran		Selisih	Keterangan
		Murni	Perubahan		
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	2.358.929.749	2.192.396.349	(166.533.400)	Berkurang
2	Program Perekonomian dan Pembangunan	1.191.070.251	945.580.251	(245.490.000)	Berkurang
3	Program Kebijakan Administrasi Pembangunan	1.000.000.000	615.705.400	(384.294.600)	Berkurang
Jumlah		4.550.000.000	3.753.682.000	(796.318.000)	Berkurang

Keterangan : Target Kinerja tetap, Perubahan pengurangan anggaran

5. Kepala Biro Organisasi dan Reformasi Birokrasi

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target Murni	Target Perubahan
1	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan	Capaian SAKIP (Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah) Perangkat Daerah (Setda)	Nilai	70-80	70-80
2	Meningkatnya Kualitas Kelembagaan yang terukur	Indeks Kelembagaan	Nilai	41-60	41-60
3	Meningkatnya Kepatuhan Pelayanan Publik	Kepatuhan Pelayanan Publik	Nilai	81,81	81,81
4	Meningkatnya Kulaitas Informasi Kinerja Perangkat Daerah	Nilai Komponen Pelaporan SAKIP Provinsi	Nilai	10,77	10,77

No	Program	Anggaran		Selisih	Keterangan
		Murni	Perubahan		
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	645.634.000	609.268.000	(36.366.000)	Berkurang
2	Program Penataan Organisasi	2.819.183.000	2.163.824.000	(655.359.000)	Berkurang
Jumlah		3.464.817.000	2.773.092.000	(691.725.000)	Berkurang

Keterangan : Target Kinerja tetap, Perubahan pengurangan anggaran

6. Kepala Biro Administrasi Pimpinan

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target Murni	Target Perubahan
1	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan	Capaian SAKIP (Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah) Perangkat Daerah (Setda)	Nilai	70-80	70-80
2	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Pimpinan Daerah	Persentase Realisasi Pelayanan Pimpinan Daerah	%	100	100

No	Program	Anggaran		Selisih	Keterangan
		Murni	Perubahan		
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	14.354.794.000	11.074.513.000	(3.280.281.000)	Berkurang
Jumlah		14.354.794.000	11.074.513.000	(3.280.281.000)	Berkurang

Keterangan : Target Kinerja Tetap, Perubahan Penambahan Anggaran

7. Kepala Biro Umum dan Perlengkapan

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target Murni	Target Perubahan
1	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan	Capaian SAKIP (Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah) Perangkat Daerah (Setda)	Nilai	70-80	70-80
2	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Setda	Persentase Realisasi Pelayanan SETDA	%	100	100

No	Program	Anggran		Selisih	Keterangan
		Murni	Perubahan		
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	202.104.224.715	200.205.899.215	1.898.325.500)	Berkurang
Jumlah		202.104.224.715	200.205.899.215	(1.898.325.500)	Berkurang

Keterangan : Target Kinerja Tetap, Perubahan Penambahan Anggaran

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas kinerja menggambarkan pengukuran capaian kinerja Sekretariat Daerah Provinsi Banten, baik capaian kinerja sasaran/program strategis yang hendak diwujudkan tahun 2023 maupun capaian kinerja keuangannya. Untuk mengukur capaian kinerja sasaran tahun 2023 tersebut disusun berdasarkan peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tatacara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Tabel 3.1
Skala Nilai Peringkat Kinerja

No.	Interval Nilai Realisasi Kinerja	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja
1	$91 \leq 100$	Sangat Baik
2	$76 \leq 90$	Tinggi
3	$66 \leq 75$	Sedang
4	$51 \leq 65$	Rendah
5	≤ 50	Sangat Rendah

Sumber: Permendagri No. 86 Tahun 2017

Dalam mengukur kinerja sasaran strategis yang didukung oleh pembiayaan program dan kegiatan, indikator yang digunakan adalah indikator *absolut*. Capaian *absolut* dirumuskan dari hubungan sebab akibat antara sasaran strategis dengan program dan kegiatan pendukung, oleh karena itu pengukuran tetap dimulai dari pengukuran kinerja kegiatan dalam mengukur keberhasilan suatu sasaran strategis.

3.1 Capaian Kinerja Sekretariat Daerah Tahun 2023

Pada sub bab akuntabilitas kinerja ini diuraikan akuntabilitas kinerja sasaran dan indikator kinerja tahun 2023 para Kepala Biro di lingkungan Sekretariat Daerah sesuai dengan peurbhan perjajnjian kinerja tahun 2023.

Kemudian hal lain yang menjadi dasar laporan akuntabilitas ini tidak melaporkan capaian kinerja sesuai dengan Perjanjian Kinerja Sekretaris Daerah adalah bahwa Sasaran Strategis serta indikator kinerja pada Perjanjian Kinerja merupakan sasaran strategis daerah yang program dan kegiatan serta pendanaanya terdapat di Organisasi Perangkat Daerah Teknis.

Selain akuntabilitas kinerja dalam laporan ini diinformasikan pula capaian kinerja keuangan pada tahun 2023 yang mendukung sasaran strategis Sekretariat Daerah Provinsi Banten.

Laporan capaian kinerja tahun 2023 sesuai dengan sasaran strategis dan indikator kinerja yang di ampu oleh biro-biro memuat analisis capaian kinerja sebagai berikut:

1. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini;
2. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir;
3. Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi;
4. Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional (jika ada);
5. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternative solusi yang telah dilakukan;
6. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya
7. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja).

Hasil analisis tersebut dapat dilihat dibawah ini :

3.1.1 Capaian Kinerja Sekretariat Daerah Provinsi Banten Tahun 2023

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian %	Keterangan
1	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah	Capaian SAKIP (Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah) Perangkat Daerah	Nilai	70-80	80,25	100,31	Semua Biro (Nilai SAKIP Tahun 2022)
2	Meningkatnya Kebijakan Daerah	Indeks Kualitas Kebijakan	Nilai	60	71	118	Biro Hukum
3	Meningkatnya Kerjasama dan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan	Skoring/Nilai Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Nilai	4,24	3,45	81,37	Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah
4	Meningkatkan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	Persentase Realisasi Rumusan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat yang diimplementasikan	%	100	100	100	Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah
5	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pengadaan Barang dan Jasa yang baik dan bebas KKN	Indeks Tata Kelola Pengadaan Barang dan Jasa	Nilai	80,8	88,59	109,64	Biro Pengadaan Barang/Jasa dan LPSE
6	Meningkatnya Kualitas Kebijakan Perekonomian Daerah	Persentase Realisasi Rumusan Bidang Perekonomian Daerah yang diimplementasikan	%	100	89,81	89,81	Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan
7	Meningkatnya Kualitas Kebijakan Administrasi Pembangunan	Persentase Realisasi Rumusan Kebijakan Administrasi Pembangunan yang diimplementasikan	%	100	88,72	88,72	Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan
8	Menigkatnya Kualitas Pelayanan Pimpinan Daerah	Persentase Realisasi Pelayanan Pimpinan Daerah	%	100	100	100	Biro Administrasi Pimpinan dan Protokol
9	Meningkatnya Kualitas Kelembagaan Yang Terukur	Indeks Kelembagaan	Nilai	41-60	84,2	205,37	Biro Organisasi dan Reformasi Birokrasi
10	Meningkatnya Kepatuhan Pelayanan Publik	Kepatuhan Pelayanan Publik	Nilai	81,81	91,16	111,43	Biro Organisasi dan Reformasi Birokrasi
11	Meningkatnya Nilai Komponen Pelaporan SAKIP Provinsi (Penugasan Dari Sekretaris Daerah)	Nilai Komponen Pelaporan SAKIP Provinsi	Nilai	10,77	10,24	95,08	Biro Organisasi dan Reformasi Birokrasi
12	Meningkatnya Kuaslitas Pelayanan Setda	Presentase Realisasi Pelayanan Setda	%	100	100	100	Biro Umum dan Perlengkapan

3.1.2 Capaian Kinerja Dibandingkan Dengan Tahun Sebelumnya

Tahun 2023 merupakan tahun pertama pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Provinsi Banten Tahun 2023-2026 dan Rencana Strategis (Renstra) Sekretariat Daerah Tahun 2023-2026 sehingga ada beberapa sasaran strategis dan indikator kinerja yang mengalami perubahan hal tersebut mengakibatkan data perbandingan capaian kinerja tidak sesuai, namun beberapa indikator kinerja masih ada yang sesuai, seperti pada tabel berikut :

3.1.2 Capaian Kinerja Dibandingkan Dengan Tahun Sebelumnya

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2021			Tahun 2022			Tahun 2023			Keterangan
				Target	Realisasi	Capaian %	Target	Realisasi	Capaian %	Target	Realisasi	Capaian %	
1	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah	Capaian SAKIP (Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah) Perangkat Daerah	Nilai	A	BB	-	85	78,96	97,50	70-80	80,25		Semua Biro (Nilai SAKIP Tahun 2022)
2	Meningkatnya Kebijakan Daerah	Indeks Kualitas Kebijakan	Nilai	-	-	-	-	-	-	60	71	118	Biro Hukum
3	Meningkatnya Kerjasama dan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan	Skoring/Nilai Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Nilai	-	-	-	-	-	-	4,24	3,45	81,37	Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah
4	Meningkatkan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	Persentase Realisasi Rumusan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat yang diimplementasikan	%	100	100	100	100	100	100	100	100	100	Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah
5	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pengadaan Barang dan Jasa yang baik dan bebas KKN	Indeks Tata Kelola Pengadaan Barang dan Jasa	Nilai	-	-	-	-	-	-	80,8	88,59	109,64	Biro Pengadaan Barang/Jasa dan LPSE
6	Meningkatnya Kualitas Kebijakan Perekonomian Daerah	Persentase Realisasi Rumusan Bidang Perekonomian Daerah yang diimplementasikan	%	100	100	100	100	100	100	100	89,81	89,81	Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan
7	Meningkatnya Kualitas Kebijakan Administrasi Pembangunan	Persentase Realisasi Rumusan Kebijakan Administrasi Pembangunan yang diimplementasikan	%	100	100	100	100	100	100	100	88,72	88,72	Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan
8	Menigkatnya Kualitas Pelayanan Pimpinan Daerah	Persentase Realisasi Pelayanan Pimpinan Daerah	%	100	100	100	100	100	100	100	100	100	Biro Administrasi Pimpinan dan Protokol
9	Meningkatnya Kualitas Kelembagaan Yang Terukur	Indeks Kelembagaan	Nilai	-	-	-	-	-	-	41-60	84,2	205,37	Biro Organisasi dan Reformasi Birokrasi
10	Meningkatnya Kepatuhan Pelayanan Publik	Kepatuhan Pelayanan Publik	Nilai	-	-	-	--	-	-	81,81	91,16	111,43	Biro Organisasi dan Reformasi Birokrasi
11	Meningkatnya Nilai Komponen Pelaporan SAKIP Provinsi (Penugasan Dari Sekretaris Daerah)	Nilai Komponen Pelaporan SAKIP Provinsi	Nilai	-	-	-	-	-	-	10,77	10,24	95,08	Biro Organisasi dan Reformasi Birokrasi
12	Meningkatnya Kuaslitas Pelayanan Setda	Presentase Realisasi Pelayanan Setda	%	100	100	100	100	100	100	100	100	100	Biro Umum dan Perlengkapan

3.1.3. Capaian Kinerja Dibandingkan Dengan Target Pembangunan Jangka Menengah (Renstra) Tahun 2023-2026

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2023			Keterangan
				Target	Realisasi	Capaian %	
1	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah	Capaian SAKIP (Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah) Perangkat Daerah	Nilai	70	80,25		Semua Biro (Nilai SAKIP Tahun 2022)
2	Meningkatnya Kebijakan Daerah	Indeks Kualitas Kebijakan	Nilai	60	71	118	Biro Hukum
3	Meningkatnya Kerjasama dan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan	Skoring/Nilai Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Nilai	4,24	3,45	81,37	Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah
4	Meningkatkan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	Persentase Realisasi Rumusan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat yang diimplementasikan	%	100	100	100	Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah
5	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pengadaan Barang dan Jasa yang baik dan bebas KKN	Indeks Tata Kelola Pengadaan Barang dan Jasa	Nilai	80,8	88,59	109,64	Biro Pengadaan Barang/ Jasa dan LPSE
6	Meningkatnya Kualitas Kebijakan Perekonomian Daerah	Persentase Realisasi Rumusan Bidang Perekonomian Daerah yang diimplementasikan	%	100	89,81	89,81	Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan
7	Meningkatnya Kualitas Kebijakan Administrasi Pembangunan	Persentase Realisasi Rumusan Kebijakan Administrasi Pembangunan yang diimplementasikan	%	100	88,72	88,72	Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan
8	Menigkatnya Kualitas Pelayanan Pimpinan Daerah	Persentase Realisasi Pelayanan Pimpinan Daerah	%	100	100	100	Biro Administrasi Pimpinan dan Protokol
9	Meningkatnya Kualitas Kelembagaan Yang Terukur	Indeks Kelembagaan	Nilai	41	84,2	205,37	Biro Organisasi dan Reformasi Birokrasi
10	Meningkatnya Kepatuhan Pelayanan Publik	Kepatuhan Pelayanan Publik	Nilai	81,81	91,16	111,43	Biro Organisasi dan Reformasi Birokrasi
11	Meningkatnya Nilai Komponen Pelaporan SAKIP Provinsi (Penugasan Dari Sekretaris Daerah)	Nilai Komponen Pelaporan SAKIP Provinsi	Nilai	10,77	10,24	95,08	Biro Organisasi dan Reformasi Birokrasi
12	Meningkatnya Kuaslitas Pelayanan Setda	Presentase Realisasi Pelayanan Setda	%	100	100	100	Biro Umum dan Perlengkapan

3.1.4. Perbandingan Antara Realisasi Kinerja Sekretariat Daerah Tahun 2023 dengan Standar Nasional

Sekretariat Daerah Provinsi Banten melaksanakan pengendalian pencapaian kinerja seluruh urusan pembangunan. Namun indikator kinerja Tujuan dan Sasaran Setda dirumuskan secara komposit sehingga tidak dapat disandingkan dengan target kinerja nasional.

Tabel 3.3.
Perbandingan Antara Realisasi Kinerja Sekretariat Daerah Tahun 2023 dengan Standar Nasional

TUJUAN/ SASARAN	INDIKATO RTUJUAN/ SASARAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN %	STANDAR NASIONAL	% CAPAIAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
NIHIL						

3.1.5 Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja Tahun 2023 Setda Provinsi Banten

Sekretariat Daerah yang terdiri dari 7 Biro memiliki 3 fungsi yaitu: pengoordinasian penyusunan kebijakan daerah, pengoordinasian pelaksanaan kebijakan daerah dan pengoordinasian pelaksanaan tugas perangkat daerah. Biro-Biro telah menjalankan fungsi tersebut dengan baik. Hal tersebut dicerminkan oleh kinerja Tujuan dan Sasaran seluruhnya tercapai lebih dari 100%.

Sekretariat Daerah yang terdiri dari 7 Biro memiliki 3 fungsi yaitu: pengoordinasian penyusunan kebijakan daerah, pengoordinasian pelaksanaan kebijakan daerah dan pengoordinasian pelaksanaan tugas perangkat daerah. Biro-Biro telah menjalankan fungsi tersebut dengan baik. Namun kinerja Tujuan dan Sasaran seluruhnya belum tercapai 100%.

Pada level sasaran yang memiliki 12 indikator kinerja yang merupakan ampuan kinerja biro-biro ada beberapa indikator yang masih belum mencapai target, hal tersebut bisa disebabkan oleh kurangnya sinergitas dalam perumusan kebijakan dan pelaksanaan kebijakan serta koordinasi yang belum intensif dalam mengawal kinerja OPD tahun 2023. Secara keseluruhan analisis keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/ penurunan kinerja tahun 2023 Sekretariat Daerah Provinsi Banten dapat dilihat pada tabel 3.4.

Tabel 3.4
Analisis Keberhasilan/Kegagalan Atau Peningkatan/ Penurunan Kinerja Tahun 2023
Sekretariat Daerah Provinsi Banten

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2023			Analisis Keberhasilan/Kegagalan
				Target	Realisasi	Capaian %	
1	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah	Capaian SAKIP (Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah) Perangkat Daerah	Nilai	70-80	80,25		Biro Administrasi pimpinan dan Protokol sebagai koordinator atas pelaporan SAKIP telah melaksanakan koordinasi yang terus-menerus dengan unit kerja perangkat daerah serta OPD Terkait dalam menyusun perencanaan, pengukuran, pelaporan dan evaluasi kinerja secara periodik
2	Meningkatnya Kebijakan Daerah	Indeks Kualitas Kebijakan	Nilai	60	71	118	Faktor Penghambat : untuk agenda pengukuran Indeks Kualitas Kebijakan Tahun 2023 oleh LAN RI, baru pertama kali dilakukan oleh Biro Hukum sebagai Admin Instansi, untuk Enumerator yang melaksanakan input data eviden adalah Perangkat Daerah pengusul Kebijakan yang terpilih (Kebijakan Daerah dalam 3 tahun terakhir) untuk diukur tingkat persentase Indeks Kualitas Kebijakannya melalui Sistem IKK.LAN.go.id Faktor Pendukung : Sudah dibentuk Tim <i>Fasilitasi Koordinasi Peningkatan Indeks Kualitas Kebijakan</i> dan penunjukan Enumerator Perangkat Daerah yang akan dinilai pada Tahun 2023
3	Meningkatnya Kerjasama dan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan	Skoring/Nilai Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Nilai	4,24	3,45	81,37	Program dan Kegiatan pada pelaksanaanya secara keseluruhan mencapai target yang sudah direncanakan (100%) namun tidak mencapai target kinerja yang ditetapkan, hal tersebut disebabkan dari hasil perbandingan target Skoring/Nilai Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Provinsi Banten 4,24 (Sangat Tinggi) bisa dikatakan terlalu tinggi jika dibandingkan dengan Nilai LPPD Tahun 2022 dengan nilai tertingginya 3,697 (Tinggi) untuk itu perlu adanya Review atas target nilai LPPD pada RENNSTRA Setda Tahun 2023-2026). Data

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2023			Analisis Keberhasilan/Kegagalan
				Target	Realisasi	Capaian %	
							dukung Keputusan Kemendagri Nomor : 100.2.1.7-6646 Tahun 2023 Tentang Hasil Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Secara Nasional Tahun 2023 Berdasarkan LPPD Provinsi dan Kabupaten/ Kota Tahun 2022 Perlu adanya kerjasama dari semua pihak dan upaya yang maksimal, karena hal ini menjadi tanggungjawab bersama seluruh OPD yang ada di Pemerintah Provinsi Banten. (Keterangan Nilai realisasi merupakan nilai LPPD Provinsi Banten Tahun 2022).
4	Meningkatkan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	Persentase Realisasi Rumusan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat yang diimplementasikan	%	100	100	100	Program dan Kegiatan pada pelaksanaannya secara keseluruhan mencapai target yang sudah direncanakan (100%)
5	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pengadaan Barang dan Jasa yang baik dan bebas KKN	Indeks Tata Kelola Pengadaan Barang dan Jasa	Nilai	80,8	88,59	109,64	Capaian Indeks Tata Kelola Pengadaan Barang/Jasa tahun 2023 sebesar 88,59 Nilai melampaui target sebesar 80,80 Nilai berkat pemenuhan persyaratan yang ditentukan oleh LKPP dan berkat kerjasama dari berbagai pihak khususnya antar bagian dilingkungan Biro PBJ dan LPSE
6	Meningkatnya Kualitas Kebijakan Perekonomian Daerah	Persentase Realisasi Rumusan Bidang Perekonomian Daerah yang diimplementasikan	%	100	89,81	89,81	Tercapainya Seluruh Kegiatan Bidang Perekonomian Daerah, pada tahun 2023 ada 4 draf penyusunan regulasi, sebagai berikut: 1. Penyusunan Draft Regulasi BUMD untuk menunjang Kebijakan BUMD Provinsi banten 2. Penyusunan Drafft Keputusan Gubernur Banten tentang Penetapan Tarif Batas Atas dan Batas Bawah Air Minum bagi BUMD Pengelola Air Minum di Wilayah Provinsi Banten Tahun 2024 3. Penyusunan Draft Regulasi BLUD untuk menunjang Kebijakan BLUD Provinsi banten 4. Penyusunan Bahan Kebijakan Ekonomi Mikro
7	Meningkatnya Kualitas Kebijakan Administrasi Pembangunan	Persentase Realisasi Rumusan Kebijakan Administrasi Pembangunan yang diimplementasikan	%	100	88,72	88,72	Penyusunan Pedoman Pelaksanaan Pembangunan (Domlak Pembangunan) Tahun 2023 tidak dilaksanakan / direalisasikan : a) Penyebab : • Sampai dengan setelah Perubahan APBD TA.2023 tidak ada perubahan ketentuan peraturan Perundangan diatasnya sebagai rujukan untuk penyempurnaan perumusan kebijakan administrasi pembangunan

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2023			Analisis Keberhasilan/Kegagalan
				Target	Realisasi	Capaian %	
							• Pergub No.62 Tahun 2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Pembangunan Daerah, diundangkan pada tanggal 30 Desember 2023 sudah disusun agar dapat digunakan setiap tahun b) Dampak Terhadap Pelayanan Publik • Tidak terdampak terhadap pelayanan Karena Pelayanan Karena Pergub No.62 Tahun 2023 masih relevan digunakan sampai adanya perubahan ketentuan peraturan di atasnya
8	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Pimpinan Daerah	Persentase Realisasi Pelayanan Pimpinan Daerah	%	100	100	100	Persentase Realisasi Pelayanan Pimpinan Daerah tercapai 100% dikarenakan adanya komitmen Pimpinan (Kepala Biro) dalam Memfasilitasi Agenda Kegiatan Pimpinan Baik di Dalam Maupun di Luar Daerah. Dengan data dukung : 1. Dokumen Materi Pimpinan Bulan Januari s/d Desember 2023 (329 Naskah Sambutan, 81 Motulen Rapat Pimpinan, 33 Materi/Paparan) 2. Laporan Hasil Fasilitasi Komunikasi Pimpinan bulan Januari s/d Desember 2023 (1,142 Press Release, 17,130 Tayang Release Berita, 983 Info Grafis) 3. Laporan Pengelolaan Dokumentasi Pimpinan bulan Januari s/d Desember 2023 (751 Foto, Vidio 751 Kegiatan) 4. Laporan Hasil Fasilitasi dan Koordinasi Pelaksanaan Acara bulan Januari s/d Desember 2023 (751 Kegiatan) 5. Laporan Hasil Fasilitasi Kunjungan Tamu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah bulan Januari s/d Desember 2023 (751 Kegiatan) 6. Laporan Pengelolaan Hubungan Keprotokolan bulan Januari s/d Desember 2023 (751 Kegiatan)
9	Meningkatnya Kualitas Kelembagaan Yang Terukur	Indeks Kelembagaan	Nilai	41-60	84,2	205,37	Struktur dan Proses Organisasi Pemerintah Provinsi Banten dinilai sangat efektif dan mempunyai kemampuan sangat tinggi untuk mengakomodir kebutuhan internal organisasi dan sangat mampu beradaptasi terhadap dinamika perubahan lingkungan eksternal, data dukung ialah Laporan Kajian Evaluasi Kelembagaan Pemprov Banten Tahun 2023 oleh Tim dari Magister Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2023			Analisis Keberhasilan/Kegagalan
				Target	Realisasi	Capaian %	
							Universitas Sultan Ageng Tirtayasa).
10	Meningkatnya Kepatuhan Pelayanan Publik	Kepatuhan Pelayanan Publik	Nilai	81,81	91,16	111,43	Dengan mendapatkan kualitas tertinggi dengan nilai 91,16 peringkat 8 dari 34 Provinsi mencerminkan bahwa Pemerintah Provinsi Banten dalam penyelenggaraan pelayanan publik telah sangat optimal, dengan data dukung (Berdasarkan Keputusan Ombudsman Nomor 418 Tahun 2023 tentang Hasil Penilaian Kepatuhan terhadap Standar Pelayanan Publik Tahun 2023)
11	Meningkatnya Nilai Komponen Pelaporan SAKIP Provinsi (Penugasan Dari Sekretaris Daerah)	Nilai Komponen Pelaporan SAKIP Provinsi	Nilai	10,77	10,24	95,08	Laporan Kinerja Pemerintah Daerah dan Perangkat Daerah belum diinformasikan secara luas kepada publik/belum diunggah ke wibsite Provinsi Banten, sehingga transparansi atas kinerja yang telah dilakukan belum berjalan optimal, dengan data dukung Hasil evaluasi Kementerian PAN RB berdasarkan Suratnya Nomor: B/400/AA.05/2023, tanggal 27 November 2023, perihal Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2023
12	Meningkatnya Kuaslitas Pelayanan Setda	Presentase Realisasi Pelayanan Setda	%	100	100	100	Terlaksanananya semua kegiatan pelayanan dengan kualitas yang semakin meningkat, namun demikian biro umum dan perlengkapan belum melaksanakan survei indeks kepuasan masyarkat (IKM) sehingga keberhasilan pencapaian target masih dilihat dari pelaksanaan kegiatan.

3.1.6 Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Setda Provinsi Banten Tahun 2023

Anggaran Sekretariat Daerah Provinsi Banten Tahun 2023 pada Perubahan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Tahun 2023 adalah sebesar **Rp. 248.211.269.200,-** dengan realisasi **Rp. 225.667.272.636,-** atau **90,92%**, terdapat sisa anggaran sebesar **Rp. 22.543.996.563,-** atau **9,08%**.

Secara keseluruhan analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya Sekretariat Daerah Provinsi Banten dapat dilihat pada tabel 3.7.

Tabel 3.5
Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Setda Provinsi Banten Tahun 2023

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian %	Pagu Anggaran	Realisasi	Capaian	Efisiensi %
1	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah	Capaian SAKIP (Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah) Perangkat Daerah	Nilai	70-80	80,25		41.019.128.304	36.290.017.966	88,47%	11,53%
2	Meningkatnya Kebijakan Daerah	Indeks Kualitas Kebijakan	Nilai	60	71	118,33%	2.688.043.200	2.324.245.100	86,47%	13,53%
3	Meningkatnya Kerjasama dan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan	Skoring/Nilai Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Nilai	4,24	3,45	81,37%	2.761.309.400	2.412.517.302	87,37%	12,63%
4	Meningkatkan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	Persentase Realisasi Rumusan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat yang diimplementasikan	%	100	100	100,00%	17.106.325.900	14.581.384.765	85,24%	14,76%
5	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pengadaan Barang dan Jasa yang baik dan bebas KKN	Indeks Tata Kelola Pengadaan Barang dan Jasa	Nilai	80,8	88,59	109,64%	1.690.742.485	1.565.149.838	92,57%	7,43%
6	Meningkatnya Kualitas Kebijakan Perekonomian Daerah	Persentase Realisasi Rumusan Bidang Perekonomian Daerah yang diimplementasikan	%	100	100	100,00%	945.580.251	819.959.123	86,71%	13,29%
7	Meningkatnya Kualitas Kebijakan Administrasi Pembangunan	Persentase Realisasi Rumusan Kebijakan Administrasi Pembangunan yang diimplementasikan	%	100	100	100,00%	615.705.400	389.697.169	63,29%	36,71%
8	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Pimpinan Daerah	Persentase Realisasi Pelayanan Pimpinan Daerah	%	100	100	100,00%	5.240.085.900	4.445.450.137	84,84%	15,16%
9	Meningkatnya Kualitas Kelembagaan Yang Terukur	Indeks Kelembagaan	Nilai	41-60	84,2	205,37%	1.098.426.000	951.850.471	86,66%	13,34%
10	Meningkatnya Kepatuhan Pelayanan Publik	Kepatuhan Pelayanan Publik	Nilai	81,81	91,16	111,43%	244.200.000	228.886.720	93,73%	6,27%
11	Meningkatnya Nilai Komponen Pelaporan SAKIP Provinsi (Penugasan Dari Sekretaris Daerah)	Nilai Komponen Pelaporan SAKIP Provinsi	Nilai	10,77	10,24	95,08%	136.812.000	108.317.433	79,17%	20,83%
12	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Setda	Persentase Realisasi Pelayanan Setda	%	100	100	100,00%	174.664.910.360	161.156.456.489	92,27%	7,73%
Jumlah							248.211.269.200	225.667.272.636	90,92%	9,08%

3.1.7. Analisis Program dan Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan/Kegagalan Pencapaian Perjanjian Kinerja.

Kinerja Sekretariat Daerah diwujudkan melalui pencapaian 12 sasaran strategis serta 12 indikator yang diampu oleh biro-biro, dan disinergikan dengan pelaksanaan program dan kegiatan. Keberhasilan program/kegiatan selanjutnya akan dianalisis dengan membandingkan rata-rata tingkat capaian kinerja tiap Sasaran dengan capaian kinerja program/kegiatan yang mendukung. Program dan kegiatan yang mendukung terhadap capaian sasaran dan kinerja dapat terlihat pada tabel 3.5 sebagai berikut :

Tabel 3.8

Analisis Program dan Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan/Kegagalan Pencapaian Perjanjian Kinerja

1. Biro Administrasi Pimpinan dan Protokol

NO	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	Program/Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan	Satuan	TARGET 2023	REALISASI	% CAPAIAN	Menunjang/Tidak Menunjang
1	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah	Capaian SAKIP (Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah) Perangkat Daerah			Nilai	70-80	80,25	100,31	
			Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Persentase Ketercapaian dari Seluruh Kegiatan pada Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Persen	100	100	100%	Menunjang
				Persentase capaian Fasilitasi Materi dan Komunikasi Pimpinan	Persen	100	100	100%	Menunjang
				Persentase Capaian Pelayanan Keprotokolan	Persen	100	100	100%	Menunjang
			Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Ketercapaian Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Sekretariat Daerah	Persen	100	100	100%	Menunjang
			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Ketercapaian Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persen	100	100	100%	Menunjang
			Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Ketercapaian Kegiatan Kepegawaian Perangkat Daerah	Persen	100	100	100%	Menunjang
			Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Ketercapaian Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persen	100	100	100%	Menunjang

NO	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	Program/Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan	Satuan	TARGET 2023	REALISASI	% CAPAIAN	Menunjang/Tidak Menunjang
			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Ketercapaian Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persen	100	100	100%	Menunjang
2	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Pimpinan Daerah	Persentase Realisasi Pelayanan Pimpinan Daerah	Fasilitasi Materi dan Komunikasi Pimpinan	Persentase Ketercapaian Kegiatan Fasilitasi Materi dan Komunikasi Pimpinan	Persen	100	100	100%	Menunjang
			Fasilitasi Keprotokolan	Persentase Ketercapaian Kegiatan Fasilitasi Keprotokolan	Persen	100	100	100%	Menunjang

2. Biro Pengadaan Barang/Jasa dan LPSE

NO	TUJUAN/SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	Program/Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan	Satuan	TARGET 2023	REALISASI	% CAPAIAN	MENUNJANG /TIDAK MENUNJANG
1	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah	Capaian SAKIP (Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah) Perangkat Daerah			Nilai	70-80	80,25	100,31	MENUNJANG
			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase Ketercapaian dari Seluruh Kegiatan pada Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Persen	100	100	100	MENUNJANG
			Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Ketercapaian Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Sekretariat Daerah (Biro Pengadaan Barang/Jasa dan Layanan Pengadaan Secara Elektronik)	Persen	100	100	100	MENUNJANG
			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Ketercapaian Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah (Biro Pengadaan Barang/Jasa dan Layanan Pengadaan Secara Elektronik)	Persen	100	100	100	MENUNJANG
			Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Ketercapaian Kegiatan Administrasi Kepegawaian perangkat daerah (Biro Pengadaan Barang/Jasa dan Layanan Pengadaan Secara Elektronik)	Persen	100	100	100	MENUNJANG
			Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Ketercapaian Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah (Biro Pengadaan Barang/Jasa dan Layanan Pengadaan Secara Elektronik)	Persen	100	100	100	MENUNJANG

NO	TUJUAN/SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	Program/Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan	Satuan	TARGET 2023	REALISASI	% CAPAIAN	MENUNJANG /TIDAK MENUNJANG
			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Ketercapaian Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (Biro Pengadaan Barang/Jasa dan Layanan Pengadaan Secara Elektronik)	Persen	100	100	100	MENUNJANG
2	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pengadaan Barang dan Jasa yang baik dan bebas KKN	Indek Tata Kelola Pengadaan Barang/Jasa			Nilai	80,8	88,59	109,64	MENUNJANG
			PROGRAM KEBIJAKAN DAN PELAYANAN PENGADAAN BARANG DAN JASA	A. Pemanfaatan Sistem Pengadaan B. Tingkat Kematangan UKPBJ C. Kualifikasi dan Kompetensi SDM PBJ	Persen	100	100	100	MENUNJANG
			Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Persentase Ketercapaian Kegiatan Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Persen	100	100	100	MENUNJANG
			Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik	Persentase Ketercapaian Kegiatan Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik	Persen	100	100	100	MENUNJANG

3. Biro Perekonomian dan Administrasi Pembagunan

NO	TUJUAN/SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	Program/Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan	Satuan	TARGET 2023	REALISASI	% CAPAIAN	Menunang/Tidak Menunang
1	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah	Capaian SAKIP (Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah) Perangkat Daerah			Nilai	70-80	80,25	100,31	
		-	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase Ketercapaian dari Seluruh Kegiatan pada Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Persen	100	92,06	92,06	Menunang
			Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase tersusunya dokumen Perencanaan, penganggaran dan evaluasi klerja perangkat daerah	Persen	100	84,57	84,57	Menunang
			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase ketercapaian administrasi keuangan perangkat daerah	Persen	100	59,73	59,73	Menunang
			Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase ketercapaian Administrasi Umum perangkat daerah	Persen	100	74,58	74,58	Menunang
			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase tersusunya laporan jasa penunjang urusan pemerinthan daerah	Persen	100	98,07	98,07	Menunang
2	Meningkatnya Kualitas Kebijakan Perekonomian Daerah	Persentase Realisasi Rumusan Kebijakan Bidang Perekonomian Daerah yang di Implementasikan			Persen	100	89,91	89,91	Menunang
			PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	Persentase tersedianya Perumusan Kebijakan Sarana Perekonomian	Persen	100	90,66	90,66	Menunang
				Persentase tersedianya Perumusan Kebijakan Industri Jasa dan Ketenagakerjaan	Persen	100	77,68	77,68	
				Persentase Tersedianya Perumusan Kebijakan Produksi Daerah	Persen	100	97,82	97,82	
			Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi Perekonomian	Persentase Ketercapaian Kegiatan Pengelolaan Kebijakan dan	Persen	100	77,68	77,68	Menunang

NO	TUJUAN/SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	Program/Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan	Satuan	TARGET 2023	REALISASI	% CAPAIAN	Menunang/Tidak Menunang
				Koordinasi Perekonomian					
			Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi Sumber Daya Alam	Persentase Ketercapaian Kegiatan Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi Sumber Daya Alam	Persen	100	97,82	97,82	Menunang
			Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi BUMD dan BLUD	Persentase Ketercapaian Kegiatan Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi BUMD dan BLUD	Persen	100	90,66	90,66	Menunang
3	Meningkatnya Kualitas Kebijakan Administrasi Pembangunan	Persentase Realisasi Rumusan Kebijakan Administrasi Pembangunan yang di Implementasikan			Persen	100	97,82	97,82	Menunang
			PROGRAM KEBIJAKAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN	Persentase Tersedianya perumusan kebijakan Administrasi Pembangunan	Persen	100	89,81	89,81	Menunang
				Persentase Tersedianya dokumen Hasil rekomendasi pengendalian Administrasi Pembangunan sebagai bahan evaluasi					Menunang
									Menunang
			Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Persentase Ketercapaian Kegiatan Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Persen	100	85,23	85,23	Menunang
			Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Persentase Ketercapaian Kegiatan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Persen	100	75,24	75,24	Menunang

4. Biro Hukum

NO	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	Program/Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan	Satuan	TARGET 2023	REALISASI	% CAPAIAN	MENUNJANG /TIDAK MENUNJANG
1	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan	Capaian SAKIP (Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah) Perangkat Daerah			Nilai	70-80	80,25	100,31	MENUNJANG
			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase Ketercapaian dari Seluruh Kegiatan pada Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Persen	100	100	100	MENUNJANG
			Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Ketercapaian Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Sekretariat Daerah	Persen	100	100	100	MENUNJANG
			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Ketercapaian Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah (Biro Hukum)	Persen	100	100	100	MENUNJANG
			Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Ketercapaian Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah (Biro Hukum)	Persen	100	100	100	MENUNJANG
			Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Ketercapaian Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persen	100	100	100	MENUNJANG
			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Ketercapaian Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persen	100	100	100	MENUNJANG
2	Meningkatnya Kualitas Kebijakan Daerah	Indeks Kualitas Kebijakan			Nilai	60			MENUNJANG
			PROGRAM FASILITASI DAN KOORDINASI HUKUM	Persentase Dokumentasi Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum	Persen	100	100	100	MENUNJANG
				Persentase Ketercapaian Kualitas Fasilitasi dan Evaluasi Produk Hukum Kabupaten/Kota	Persen	100	100	100	MENUNJANG
				Persentase Ketercapaian Kualitas Produk Hukum Provinsi dan Keselarasan Peraturan Perundang-undangan Daerah dengan	Persen	100	100	100	MENUNJANG

NO	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	Program/Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan	Satuan	TARGET 2023	REALISASI	% CAPAIAN	MENUNJANG /TIDAK MENUNJANG
				Regulasi Hukum Nasional					
				Persentase Fasilitasi Bantuan Hukum dan HAM	Persen	100	100	100	MENUNJANG
			Fasilitasi Penyusunan Perundang-undangan	Persentase Ketercapaian Kegiatan Fasilitasi Penyusunan Perundang-undangan	Persen	100	99,39	99,39	MENUNJANG
			Fasilitasi Bantuan Hukum	Persentase Ketercapaian Kegiatan Fasilitasi Bantuan Hukum	Persen	100	100	100	MENUNJANG

5. Biro Organisasi dan Reformasi Birokrasi

NO	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	Program/Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan	Satuan	TARGET 2023	REALISASI	% CAPAIAN	Menunjang/Tidak Menunjang
1	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah	Capaian SAKIP (Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah) Perangkat Daerah			Nilai	70-80	80,25	100,31%	
			Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Persentase Ketercapaian dari Seluruh Kegiatan pada Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Persen	100	100	100,00%	Menunjang
			Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Ketercapaian Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persen	100	100	100,00%	Menunjang
			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Ketercapaian Kegiatan Administrasi Keuangan perangkat daerah	Persen	100	100	100,00%	Menunjang
			Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Ketercapaian Kegiatan Administrasi Kepegawaian perangkat daerah	Persen	100	99	99,00%	Menunjang
			Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Ketercapaian Kegiatan Administrasi Umum perangkat daerah	Persen	100	98	98,00%	Menunjang
			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Ketercapaian Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persen	100	100	100,00%	Menunjang
2	Meningkatnya Kualitas Kelembagaan yang terukur	Indeks Kelembagaan			Nilai	41	84,2	205,37%	
3	Meningkatnya Kepatuhan Pelayanan Publik	Kepatuhan Pelayanan Publik			Nilai	81,81	91,16	111,43%	

NO	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	Program/Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan	Satuan	TARGET 2023	REALISASI	% CAPAIAN	Menunjang/Tidak Menunjang
4	Meningkatnya Kulaitas Informasi Kinerja Perangkat Daerah	Nilai Komponen Pelaporan SAKIP Provinsi			Nilai	10,77	10,24	95,08%	
			Program Penataan Organisasi	Persentase cakupan kegiatan akuntabilitas Kinerja	Persen	100	95	95,00%	Menunjang
				Persentase cakupan kegiatan kelembagaan dan analisis jabatan	Persen	100	95	95,00%	Menunjang
				Persentase cakupan kegiatan Ketatalaksanaan dan pelayanan publik	Persen	100	95	95,00%	Menunjang
				Persentase cakupan kegiatan reformasi dan Budaya Kerja	Persen	100	95	95,00%	Menunjang
			Fasilitasi Kelembagaan dan Analisis Jabatan	Persentase Ketercapaian Kegiatan Fasilitasi Kelembagaan dan Analisis Jabatan	Persen	100	95	95,00%	Menunjang
			Fasilitasi Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja	Persentase Ketercapaian Kegiatan Fasilitasi Reformasi Birokrasi dan Kauntabilitas Kinerja	Persen	100	95	95,00%	Menunjang

6. Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah

NO	TUJUAN/SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	Program/Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan	Satuan	TARGET 2023	REALISASI	% CAPAIAN	Menunang/Tidak Menunjang
1	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah	Capaian SAKIP (Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah) Perangkat Daerah			Nilai	70-80	80,25	100,31	
			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase Ketercapaian dari Seluruh Kegiatan pada Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Persen	100	100	100	Menunjang
			Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Ketercapaian Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Sekretariat Daerah	Persen	100	100	100	Menunjang
			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Ketercapaian Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persen	100	100	100	Menunjang
			Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Ketercapaian Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persen	100	100	100	Menunjang
			Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Ketercapaian Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persen	100	100	100	Menunjang
			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Ketercapaian Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persen	100	100	100	Menunjang
2	Meningkatnya Kerjasama dan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan	Skorsing/Nilai Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah			Nilai	4,24	3,45	81,37	
			PROGRAM PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH	Persentase Realisasi Kebijakan Pemerintahan dan Otonomi Daerah	Persen	100	100	100	Menunjang
			Pelaksanaan Tugas Pemerintahan	Ketercapaian Jumlah Dokumen Kegiatan Pelaksanaan Tugas Pemerintahan	Persen	100	100	100	Menunjang
			Pelaksanaan Otonomi Daerah	Persentase Ketercapaian Kegiatan Pelaksanaan Otonomi Daerah	Persen	100	100	100	Menunjang

NO	TUJUAN/SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	Program/Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan	Satuan	TARGET 2023	REALISASI	% CAPAIAN	Menunang/Tidak Menunjang
			Fasilitasi Kerja Sama Daerah	Persentase Ketercapaian Kegiatan Fasilitasi Kerja Sama Daerah	Persen	100	100	100	Menunjang
3	Meningkatkan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	Persentasi Realisasi Rumusan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat yang diimplementasikan			Persen	100	100	100	
			PROGRAM KESEJAHTERAAN RAKYAT	Persentase Realisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	Persen	100	100	100	Menunjang
			Fasilitasi Pembinaan Mental Spiritual	Persentase Ketercapaian Kegiatan Pembinaan Mental Spiritual	Persen	100	100	100	Menunjang
			Fasilitasi Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Pelayanan Dasar	Ketercapaian Jumlah Dokumen kegiatan Fasilitasi Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Pelayanan Dasar	Persen	100	100	100	Menunjang
			Fasilitasi Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Non Pelayanan Dasar	Ketercapaian Jumlah Dokumen kegiatan Fasilitasi Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Non Pelayanan Dasar	Persen	100	100	100	Menunjang

7. Biro Umum dan Perlengkapan

NO	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	Program/Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan	Satuan	TARGET 2023	REALISASI	% CAPAIAN	Menunjang/Tidak Menunjang
1	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah	Capaian SAKIP (Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah) Perangkat Daerah			Nilai	70-80	80,25	100,31	
2	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Setda	Persentase Realisasi Pelayanan SETDA			Persen	100	100	100%	
			Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Persentase Ketercapaian dari Seluruh Kegiatan pada Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Persen	100	100	100%	Menunjang
			Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Ketercapaian Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Sekretariat Daerah	Persen	100	100	100%	Menunjang
			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Ketercapaian Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persen	100	100	100%	Menunjang
			Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Ketercapaian Kegiatan Kepegawaian Perangkat Daerah	Persen	100	100	100%	Menunjang
			Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Ketercapaian Kegiatan Kepegawaian Perangkat Daerah	Persen	100	100	100%	Menunjang
			Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Ketercapaian Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persen	100	100	100%	Menunjang
			Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Ketercapaian dari Seluruh Kegiatan pada Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Persen	100	100	100%	Menunjang

NO	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	Program/Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan	Satuan	TARGET 2023	REALISASI	% CAPAIAN	Menunjang/Tidak Menunjang
			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Ketercapaian dari Seluruh Kegiatan pada Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Persen	100	100	100%	Menunjang
			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Capaian Fasilitas Tata Usaha	Persen	100	100	100%	Menunjang
			Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Persentase capaian tata kelola keuangan dan aset SETDA	Persen	100	100	100%	Menunjang
			Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah	Persentase capaian layanan rumah tangga pimpinan daerah dan fasilitasi layanan SETDA	Persen	100	100	100%	Menunjang

3.2 Realisasi Anggaran

Dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Sekretariat Daerah Provinsi Banten pada Tahun 2023, didukung APBD sebesar Rp 248.211.269.200,- (Dua ratus empat puluh delapan milyar dua ratus sebelas juta dua ratus enam puluh sembilan ribu dua ratus rupiah) secara ringkas komposisi penggunaan sebagai berikut:

1. Biro Pengadaan Barang/Jasa dan LPSE

No.	Nama Program dan Kegiatan		Anggaran	Realisasi	Capaian %
I	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi		2.390.043.000	2.281.716.558	95,47
	1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	53.416.200	52.400.384	98,10
	2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	10.500.000	10.188.474	97,03
	3	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	111.679.000	88.127.244	78,91
	4	Administrasi Umum Perangkat Daerah	321.947.800	247.551.005,00	76,89
	5	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.892.500.000	1.883.449.451	99,52
II	Program Kebijakan Dan Pelayanan Pengadaan Barang Dan Jasa		1.690.742.485	1.565.149.838,00	92,57
	6	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	418.242.900	366.024.120	87,51
	7	Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik	954.912.000	927.035.671	97,08
	8	Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	317.587.585	272.090.047	85,67
JUMLAH			4.080.785.485	3.846.866.396	94,27

2. Biro Pengadaan Barang/Jasa dan LPSE

No.	Nama Program dan Kegiatan		Anggaran	Realisasi	Capaian %
I	Program penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi		604.006.800,00	533.335.990,00	88,30
	1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	135.638.000,00	116.757.500,00	86,08
	2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	4.014.000,00	3.907.000,00	97,33
	3	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	30.750.000,00	18.955.000,00	61,64
	4	Administrasi Umum Perangkat Daerah	211.006.400,00	198.934.618,00	94,28
	5	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	222.598.400,00	194.781.872,00	87,50
II	Program Fasilitasi Dan Koordinasi Hukum		2.688.043.200,00	1.710.888.400,00	63,65
	6	Fasilitasi Penyusunan Perundang-Undangan	1.462.880.400,00	1.172.337.500,00	80,14
	7	Fasilitasi Bantuan Hukum	1.225.162.800,00	538.550.900,00	43,96
JUMLAH			3.292.050.000,00	2.857.581.090,00	86,80

3. Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah

No.	Nama Program dan Kegiatan		Anggaran	Realisasi	Capaian %
I	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi		3.163.612.200,00	2.834.786.119,00	89,61
	1	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	138.222.200,00	90.016.100,00	65,12
	2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	103.694.000,00	68.844.250,00	66,39
	3	Administrasi Kepegawaian dan Perangkat Daerah	327.386.600,00	301.106.500,00	91,97
	4	Administrasi Umum Perangkat Daerah	992.009.400,00	845.029.412,00	85,18
	5	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.602.300.000,00	1.529.789.857,00	95,47
II	Program Pemerintahan Dan Otonomi Daerah		2.761.309.400,00	2.412.517.302,00	87,37
	1	Pelaksanaan Tugas Pemerintahan	938.275.000,00	763.651.520,00	81,39
	2	Pelaksanaan Otonomi Daerah	1.013.034.400,00	898.229.467,00	88,67
	3	Fasilitasi Kerjasama Daerah	810.000.000,00	750.636.315,00	92,67
III	Program Kesejahteraan Rakyat		17.106.325.900,00	14.581.384.765,38	85,24
	1	Fasilitasi Pembinaan Mental Spiritual	15.826.325.900,00	13.585.646.865,38	85,84
	2	Fasilitasi Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Pelayanan Dasar	720.000.000,00	665.133.000,00	92,38
	3	Fasilitasi Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Non Pelayanan Dasar	560.000.000,00	330.604.900,00	59,04
JUMLAH			23.031.247.500,00	19.828.688.186,38	86,09

4. Biro Administrasi Pimpinan dan Protokol

No.	Program dan Kegiatan	Anggaran	Realisasi	Capaian %
A	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	11.074.513.000,00	9.843.261.653,00	88,88
1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	446.294.000,00	417.831.993,00	93,62
2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	55.380.000,00	52.116.293,00	94,11
3	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	1.235.132.400,00	1.151.704.985,00	93,25
4	Administrasi Umum Perangkat Daerah	104.688.500,00	102.442.479,00	97,85
5	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	3.992.932.200,00	3.673.715.766,00	92,01
6	Fasilitasi Materi dan Komunikasi Pimpinan	3.643.033.000,00	3.218.698.017,00	88,35
7	Fasilitasi Keprotokolan	1.597.052.900,00	1.226.752.120,00	76,81
J U M L A H		11.074.513.000,00	9.843.261.653,00	88,88

5. Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan

No.	Nama Program dan Kegiatan	Anggaran	Realisasi	Capaian %
I.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	2.505.407.749,00	2.136.227.140,00	84,57
	1. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	18.860.000,00	11.264.669,00	59,73
	2. Administrasi Umum Perangkat Daerah	490.896.509,00	366.102.381,00	74,58
	3. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.618.799.840,00	1.587.027.631,00	98,04
	4. Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	63.840.000,00	53.991.174,00	84,57
	5. Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Daerah	313.011.400,00	117.841.285,00	37,65
II.	Program Perekonomian dan Pembangunan	945.580.251,00	819.959.123,00	86,71
	6. Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi BUMD dan BLUD	357.248.000,00	323.877.000,00	90,66
	7. Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi Perekonomian	394.408.000,00	306.379.323,00	77,68
	8. Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi Sumber Daya Alam	193.924.251,00	189.702.800,00	97,82
III.	Program Kebijakan Administrasi Pembangunan	302.694.000,00	271.855.884,00	89,81
	9. Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah	302.694.000,00	271.855.884,00	89,81
JUMLAH		3.753.682.000,00	3.228.042.147,00	86,00

6. Biro Organisasi dan Reformasi Birokrasi

No.	Program dan Kegiatan	Anggaran	Realisasi	Capaian %
I	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	609.268.000	572.696.862	94,00
	1. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	10.650.000	9.239.241	86,75
	2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	4.500.000	4.496.400	99,92
	3. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	95.076.000	85.071.814	89,48
	4. Administrasi Umum Perangkat Daerah	159.640.300	144.273.622	90,37
	5. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	339.401.700	329.615.785	97,12
II	PROGRAM PENATAAN ORGANISASI	2.163.824.000	1.856.405.241	85,79
	6. Fasilitasi Kelembagaan dan Analisis Jabatan	1.098.426.000	951.850.471	86,66
	7. Fasilitasi Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja	1.065.398.000	904.554.770	84,90
Jumlah		2.773.092.000	2.429.102.103	87,60

7. Biro Umum dan Perlengkapan

No.	Program dan Kegiatan	Anggaran	Realisasi	Capaian %
I.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi			
	1. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	97.718.000	83.010.831,00	84,95
	2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	101.688.238.000,00	96.024.027.652,00	94,43
	3. Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	92.894.000,00	89.643.300,00	96,50
	4. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	489.000.000,00	478.756.487,00	97,91
	5. Administrasi Umum Perangkat Daerah	18.683.599.866,00	16.858.393.226,00	90,23
	6. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	7.290.400.915,00	6.768.568.231,00	92,84
	7. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	24.954.270.855,00	21.915.507.254,00	87,82
	8. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	21.120.777.020,00	19.606.417.833,00	92,83
	9. Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	14.956.457.429,00	13.815.514.230,00	92,37
	10. Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah	10.832.543.130,00	7.993.892.017,00	73,80
Jumlah		200.205.899.215,00	183.633.731.061,00	91,72

4.1 KESIMPULAN

1. Sekretariat Daerah Provinsi Banten tahun 2022 memiliki indikator Tujuan dan Sasaran sebanyak 12 indikator, yang capaian dalam kategori **“baik”** dan **“sangat baik”**. Hal yang berkontribusi dalam pencapaian kinerja, antara lain: kolaborasi dengan berbagai pihak dalam penyusunan dan pelaksanaan kebijakan pembangunan daerah; efektifnya pengendalian kinerja perangkat daerah oleh Biro lingkup Setda sebagai koordinator pelaksanaan kebijakan di Banten; dan adanya perbaikan layanan umum Sekretariat Daerah.
2. Seluruh indikator Tujuan dan Sasaran tahun 2023 memiliki tingkat capaian lebih dari 80% sehingga terhadap target akhir tahun 2024, diprediksi seluruhnya akan tercapai.
3. Sekretariat Daerah Provinsi Banten melaksanakan pengendalian pencapaian kinerja seluruh urusan pembangunan. Namun indikator kinerja Tujuan dan Sasaran Setda dirumuskan secara komposit sehingga tidak dapat disandingkan dengan target kinerja nasional.
4. Seluruh indikator Kinerja Tujuan dan Sasaran sebanyak 12 indikator, 10 indikator tercapai diatas 100%. Hal yang mendukung pencapaian kinerja antara lain: Adanya sinergi dalam perumusan kebijakan dan pelaksanaan kebijakan, koordinasi yang intensif dalam mengawal kinerja OPD ampunan serta adanya sinergi dan kerjasama daerah dengan berbagai pemangku kepentingan terkait, 3 indikator capaiannya di bawah 100%, yaitu skoring nilai LPPD capaian 81,37% hal tersebut diakrenakan nilai capaian tahun 2022 dibandingkan dengan target tahun 2023 dan Nilai komponen SAKIP capaian 95,08%,
5. Anggaran Sekretariat Daerah Provinsi Banten tahun 2023 sebanyakRp. 248.211.269.200,- dengan realisasi sebesar Rp. 248.211.269.200,- atau 90.92% terdapat efisiensi sebesar

9.08%.

6. Kinerja Tujuan Sekretariat Daerah diwujudkan melalui pencapaian 12 sasaran strategis, yang seluruhnya tercapai secara sinergis dengan kinerja program dan kegiatan. Hal tersebut ditunjukkan antara lain oleh Program Fasilitasi Dan Koordinasi Hukum mampu mewujudkan pelaksanaan formulasi kebijakan yang efektif; Program Perekonomian dan Pembangunan mampu mengawal pencapaian target-target kinerja urusan pembangunan daerah; dan Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi mampu mewujudkan layanan umum secara prima dan meningkatkan akuntabilitas Sekretariat Daerah.

4.2 SARAN

Terhadap permasalahan diatas, perlu dilakukan hal-hal sebagai berikut:

7. Biro-Biro melakukan pemetaan dan perumusan kebijakan pelaksanaan pembangunan yang mengikuti perkembangan situasi Nasional, Provinsi dan Kabupaten/Kota melalui optimalisasi peran Pejabat Fungsional Analis Kebijakan dan Jabatan Fungsional lainnya di lingkup Sekretariat Daerah.
8. Biro-Biro meningkatkan sinergi dan kolaborasi dengan SKPD teknis dan stakeholders lainnya guna memastikan kebijakan yang disusun dapat terlaksana dengan optimal.
9. Biro-Biro meningkatkan efektifitas koordinasi, fasilitasi dan sinkronisasi agenda biro dengan SKPD teknis guna menuntaskan target kinerja indikator daerah dan indikator kinerja utama perangkat daerah sesuai dengan RPD Provinsi Banten Tahun 2023-2026.
10. Biro-Biro melaksanakan agenda dan kebijakan pembangunan yang bersinergi dengan agenda dan kebijakan Pemerintah pusat yang dilaksanakan di Provinsi Banten.
11. Biro-Biro meningkatkan pengendalian kebijakan yang dilaksanakan SKPD teknis dengan membuat laporan pengendalian kebijakan dalam pelaksanaan dan pencapaian kinerja pembangunan daerah.

12. Biro-Biro melaksanakan agenda-agenda yang mampu mendukung target kinerja Program dan Kegiatan serta dapat mengungkit kinerja Tujuan dan Sasaran Sekretariat Daerah.

Dengan demikian perlu perhatian terhadap hal-hal tersebut di atas, dan diharapkan terjadi penguatan konsistensi upaya pencapaian rencana strategis dan peningkatan kualitas capaian hasil kinerja yang pada akhirnya akan memberikan kontribusi positif terhadap pencapaian Tujuan dan Sasaran Sekretariat Daerah khususnya, serta Visi dan Misi Pemerintah Provinsi Banten pada umumnya.

Lampiran-lampiran

- 1) Perjanjian Kinerja
- 2) Surat Pernyataan Telah Di Reviu
- 3) Piagam Anugerah Pengadaan 2023 Peringkat 3 Kategori Pemerintah Provinsi Dengan Nilai Transaksi UMK Terbesar
- 4) Piagam Penghargaan Mitra Plaza Banten dalam Mewujudkan UMKM Go Digital (Biro Pengadaan Barang/Jasa dan LPSE Provinsi Banten)
- 5) Piagam Penghargaan Terbaik Ke-2 Nasional Indeks Reformasi Hukum Tahun 2023 Kategori Pemerintah Provinsi (Biro Hukum)
- 6) Piagam Penghargaan Terbaik Ke-4 Nasional Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) Provinsi Banten Tingkat Provinsi (Biro Hukum)



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **Dr. Ir. MOCH. TRANGGONO, M.Sc.**

Jabatan : **Pj. Sekretaris Daerah**

selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **AL MUKTABAR**

Jabatan : **Pj. GUBERNUR BANTEN**

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Serang, Januari 2023

Pihak Kedua,

AL MUKTABAR

Pihak Pertama,

Dr. Ir. MOCH. TRANGGONO, M.Sc.
NIP. 19631210 199003 1 005

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET
1	Meningkatnya Kualitas Keluarga Sejahtera	Indeks Pembangunan Keluarga	Nilai	58,13
2	Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Daerah Perbatasan	Indeks Desa Membangun (IDM)	Indeks	0,665
3	Meningkatnya Pelayanan Sosial	Proporsi Penduduk Miskin yang mendapatkan Pelayanan Sosial	Persen	7,74
4	Meningkatnya Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)	Persen	65,19
5	Meningkatnya Pemerataan Akses dan Kualitas Pendidikan Masyarakat	Rata-rata Lama sekolah (RLS)	Tahun	9,11
		Harapan Lama Sekolah (HLS)	Tahun	13,75
6	Meningkatnya kualitas kesehatan masyarakat	Angka Harapan Hidup (AHH)	Tahun	70,4
		Prevalensi Stunting pada Balita	Persen	23,5
7	Meningkatnya Pembangunan dan Pemberdayaan Gender	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	Indeks	93,07
8	Terbentuknya Karakter dan Jati Diri Masyarakat yang berakhlak Mulia dan Berbudaya	Indeks Pembangunan Kebudayaan	Nilai	55,03
		Indeks Pembangunan Pemuda dan Olahraga	Nilai	49,42
9	Meningkatnya Daya Beli Masyarakat	Pengeluaran Per Kapita Pertahun yang disesuaikan	Ribu Rupiah	12.168
10	Meningkatnya Iklim Investasi dan Usaha	Pertumbuhan Pembentukan Modal Tetap Bruto (TMTB)	Persen	3,97
11	Meningkatnya Kontribusi Sektor Industri dan Perdagangan	Laju Pertumbuhan Ekonomi Sektor Industri	Persen	4,99
		Laju Pertumbuhan Ekonomi Sektor Perdagangan	Persen	2,44
12	Meningkatnya Kontribusi Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Laju Pertumbuhan Ekonomi Sektor Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Persen	4,39
13	Meningkatnya Kontribusi Sektor Pertanian dan Kelautan	Laju Pertumbuhan Ekonomi Sektor Pertanian dan Kelautan	Persen	0,68
14	Meningkatnya Kualitas dan Kuantitas Infrastruktur Dasar dan Strategis	Indeks Daya Saing Infrastruktur	Level	Tinggi
15	Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup dan Pengelolaan Sumber Daya Alam	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	Nilai	62,99
16	Meningkatnya Mitigasi Kesiapsiagaan dan Tanggap Darurat Bencana	Indeks Risiko Bencana	Nilai	147,37
17	Meningkatnya	Indeks Pengelolaan Keuangan	Indeks	82,20

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET
	Penyelenggaraan Reformasi Birokrasi	Daerah		
		Indeks Persepsi Anti Korupsi	Nilai	2-3
		Indeks Persepsi Kualitas Layanan Publik	Nilai	3,47
		Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (SAKIP)	Nilai	69,77
18	Meningkatnya Stabilitas Ketahanan Nasional di Provinsi Banten	Indeks Ketahanan Nasional Provinsi Banten	Level	Cukup Tangguh

PENDAPATAN DAERAH

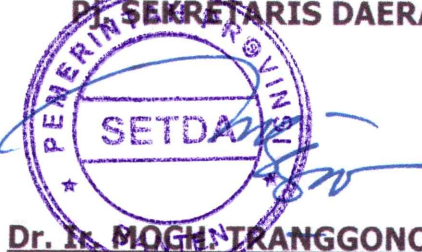
KODE	URAIAN	ANGGARAN
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	0

BELANJA DAERAH

KODE	URUSAN/PROGRAM	ANGGARAN
4.01	SEKRETARIAT DAERAH	259.793.000.000
4.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	226.736.795.264
4.01.02	PROGRAM PENATAAN ORGANISASI	2.819.183.000
4.01.03	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH	3.350.000.000
4.01.04	PROGRAM KESEJAHTERAAN RAKYAT	19.480.000.000
4.01.05	PROGRAM FASILITASI DAN KOORDINASI HUKUM	3.265.727.200
4.01.06	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	1.191.070.251
4.01.07	PROGRAM KEBIJAKAN DAN PELAYANAN PENGADAAN BARANG DAN JASA	1.950.224.285
4.01.08	PROGRAM KEBIJAKAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN	1.000.000.000
TOTAL BELANJA		259.793.000.000

PJ. GUBERNUR BANTEN,

AL MUKTABAR

PJ. SEKRETARIS DAERAH,

Dr. Ir. MOGHNTRANGGONO, M.Sc.
NIP. 19631210 199003 1 005



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **Dr. KOMARUDIN, MAP**

Jabatan : **ASISTEN PEMERINTAHAN**

selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **AL MUKTABAR**

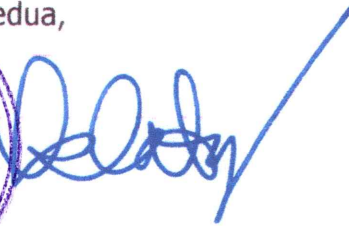
Jabatan : **Pj. GUBERNUR BANTEN**

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Serang, Januari 2023

Pihak Kedua,


AL MUKTABAR

Pihak Pertama,


Dr. KOMARUDIN, MAP
NIP. 19700721 199101 1 002

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET
1	Meningkatnya Kualitas Keluarga Sejahtera	Indeks Pembangunan Keluarga	Nilai	58,13
2	Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Daerah Perbatasan	Indeks Desa Membangun (IDM)	Indeks	0,665
3	Meningkatnya Pelayanan Sosial	Proporsi Penduduk Miskin yang mendapatkan Pelayanan Sosial	Persen	7,74
4	Meningkatnya Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)	Persen	65,19
5	Meningkatnya Pemerataan Akses dan Kualitas Pendidikan Masyarakat	Rata-rata Lama sekolah (RLS)	Tahun	9,11
		Harapan Lama Sekolah (HLS)	Tahun	13,75
6	Meningkatnya kualitas kesehatan masyarakat	Angka Harapan Hidup (AHH)	Tahun	70,4
		Prevalensi Stunting pada Balita	Persen	23,5
7	Meningkatnya Pembangunan dan Pemberdayaan Gender	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	Indeks	93,07
8	Terbentuknya Karakter dan Jati Diri Masyarakat yang berakhlak Mulia dan Berbudaya	Indeks Pembangunan Kebudayaan	Nilai	55,03
		Indeks Pembangunan Pemuda dan Olahraga	Nilai	49,42



P. GUBERNUR BANTEN,

AL MUKTABAR



ASISTEN PEMERINTAHAN,

Dr. KOMARUDIN, MAP

NIP. 19700721 199101 1 002



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **Dr. M. YUSUF, S.Sos, M.Si**

Jabatan : **ASISTEN PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN**

selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **AL MUKTABAR**

Jabatan : **Pj. GUBERNUR BANTEN**

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Serang, Januari 2023



Pihak Kedua,
AL MUKTABAR

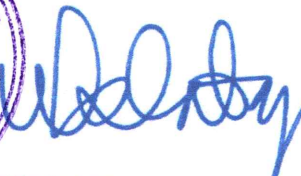


Pihak Pertama,
Dr. M. YUSUF, S.Sos, M.Si
NIP. 19650824 198712 1 002

**SATUAN KERJA : ASISTEN PEREKONOMIAN DAN
PEMBANGUNAN**

DPA TA-2023

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET
1	Meningkatnya Daya Beli Masyarakat	Pengeluaran Per Kapita Tahunan yang disesuaikan	Ribu Rupiah	12.168
2	Meningkatnya Iklim Investasi dan Usaha	Pertumbuhan Pembentukan Modal Tetap Bruto (TMTB)	Persen	3,97
3	Meningkatnya Kontribusi Sektor Industri dan Perdagangan	Laju Pertumbuhan Ekonomi Sektor Industri	Persen	4,99
		Laju Pertumbuhan Ekonomi Sektor Perdagangan	Persen	2,44
4	Meningkatnya Kontribusi Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Laju Pertumbuhan Ekonomi Sektor Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Persen	4,39
5	Meningkatnya Kontribusi Sektor Pertanian dan Kelautan	Laju Pertumbuhan Ekonomi Sektor Pertanian dan Kelautan	Persen	0,68
6	Meningkatnya Kualitas dan Kuantitas Infrastruktur Dasar dan Strategis	Indeks Daya Saing Infrastruktur	Level	Tinggi
7	Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup dan Pengelolaan Sumber Daya Alam	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	Nilai	62,99
8	Meningkatnya Mitigasi Kesiapsiagaan dan Tanggap Darurat Bencana	Indeks Risiko Bencana	Nilai	147,37

PJ. GUBERNUR BANTEN,


AL MUKTABAR

**ASISTEN PEREKONOMIAN DAN
PEMBANGUNAN,**


Dr. M. YUSUF, S.Sos, M.Si
NIP. 19650824 198712 1 002



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **Drs. E. A. DENI HERMAWAN, M. Si**

Jabatan : **ASISTEN ADMINISTRASI UMUM**

selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **AL MUKTABAR**

Jabatan : **Pj. GUBERNUR BANTEN**

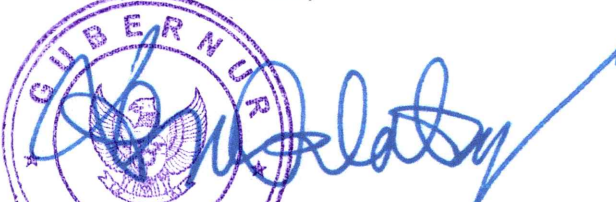
selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Serang, Januari 2023

Pihak Kedua,



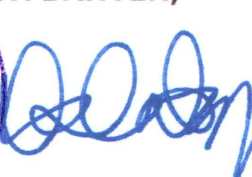
AL MUKTABAR

Pihak Pertama,



Drs. E. A. DENI HERMAWAN, M. Si
NIP. 19671228 199312 1 001

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET
1	Meningkatnya Penyelenggaraan Reformasi Birokrasi	Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah	Indeks	82,20
		Indeks Persepsi Anti Korupsi	Nilai	2-3
		Indeks Persepsi Kualitas Layanan Publik	Nilai	3,47
		Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (SAKIP)	Nilai	69,77

 **PEMERINTAH PROVINSI BANTEN,**
GOVERNUR BANTEN,

AL MUKTABAR

 **ASISTEN ADMINISTRASI UMUM,**

Drs. E. AT DENI HERMAWAN, M. Si
NIP. 19671228 199312 1 001



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **GUNAWAN RUSMINTO, AP, M.Si**

Jabatan : **KEPALA BIRO PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT**

selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **Dr. Ir. MOCH. TRANGGONO, M.Sc.**

Jabatan : **Pj. SEKERTARIS DAERAH**

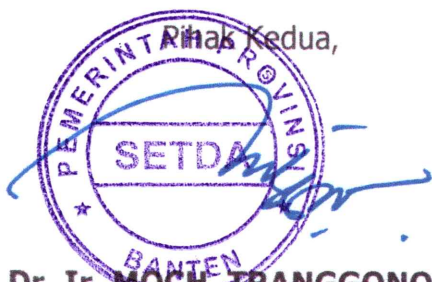
selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Serang, Januari 2023

Pihak Pertama,



Dr. Ir. MOCH. TRANGGONO, M.Sc.
NIP. 19631210 199003 1 005

GUNAWAN RUSMINTO, AP, M.Si
NIP. 19741004 199402 1 002

SATUAN KERJA : BIRO PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT

DPA TA-2023

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET
1	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan	Capaian SAKIP (Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah) Perangkat Daerah	Skor/Nilai	70-80
2	Meningkatnya Kerjasama dan penyelenggaraan adminstrasi pemerintahan	Skoring/Nilai Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Nilai	4,24
3	Meningkatkan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	Persentase Realisasi Rumusan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat yang diimplementasikan	Persen	100

PENDAPATAN DAERAH

KODE	URAIAN	ANGGARAN
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	0

BELANJA DAERAH

KODE	URUSAN/PROGRAM	ANGGARAN
4.01	SEKRETARIAT DAERAH	27.040.000.000
4.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	4.210.000.000
4.01.03	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH	3.350.000.000
4.01.04	PROGRAM KESEJAHTERAAN RAKYAT	19.480.000.000
	TOTAL BELANJA	27.040.000.000

PI SEKERTARIS DAERAH



Dr. Ir. MOCH. TRANGGONO, M.Sc.
NIP. 19631210 199003 1 005

KEPALA BIRO PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT,



GUNAWAN RUSMINTO, AP, M.Si
NIP. 19741004 199402 1 002



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **HADI PRAWOTO, SH**

Jabatan : **Plt. KEPALA BIRO HUKUM**

selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **Dr. Ir. MOCH. TRANGGONO, M.Sc.**

Jabatan : **Pj. SEKERTARIS DAERAH**

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Serang, Januari 2023

Pihak Kedua,


Dr. Ir. MOCH. TRANGGONO, M.Sc.
NIP. 19631210 199003 1 005

Pihak Pertama,


HADI PRAWOTO, SH
NIP. 19670619 199403 1 002

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET
1	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan	Capaian SAKIP (Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah) Perangkat Daerah	Nilai	70-80
2	Meningkatnya Kualitas Kebijakan Daerah	Indeks Kualitas Kebijakan	Nilai	60

PENDAPATAN DAERAH

KODE	URAIAN	ANGGARAN
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	0

BELANJA DAERAH

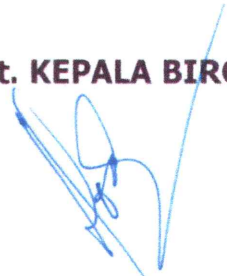
KODE	URUSAN/PROGRAM	ANGGARAN
4.01	SEKRETARIAT DAERAH	3.925.000.000
4.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	659.272.800
4.01.05	PROGRAM FASILITASI DAN KOORDINASI HUKUM	3.265.727.200
	TOTAL BELANJA	3.925.000.000

Pj. SEKRETARIS DAERAH,



Dr. Ir. MOCH. TRANGGONO, M.Sc.
NIP. 19631210 199003 1 005

Plt. KEPALA BIRO HUKUM,



HADI PRAWOTO, SH
NIP. 19670619 199403 1 002



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **Ir. SOERJO SOEBIANDONO, MA**

Jabatan : **KEPALA BIRO PENGADAAN BARANG/JASA**

selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **Dr. Ir. MOCH. TRANGGONO, M.Sc.**

Jabatan : **Pj. SEKERTARIS DAERAH**

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Serang, Januari 2023

Pihak Pertama,



Dr. Ir. MOCH. TRANGGONO, M.Sc.
NIP. 19631210 199003 1 005

Ir. SOERJO SOEBIANDONO, MA
NIP. 19711025 200112 1 001

SATUAN KERJA : BIRO PENGADAAN BARANG/JASA

DPA TA-2023

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET
1	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan	Capaian SAKIP (Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah) Perangkat Daerah	Nilai	70-80
2	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pengadaan Barang dan Jasa yang baik dan bebas KKN	Indeks Tata Kelola Pengadaan barang dan jasa	Nilai	80,8

PENDAPATAN DAERAH

KODE	URAIAN	ANGGARAN
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	0

BELANJA DAERAH

KODE	URUSAN/PROGRAM	ANGGARAN
4.01	SEKRETARIAT DAERAH	4.354.164.285
4.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	2.403.940.000
4.01.07	PROGRAM KEBIJAKAN DAN PELAYANAN PENGADAAN BARANG DAN JASA	1.950.224.285
	TOTAL BELANJA	4.354.164.285

Pj. SEKERTARIS DAERAH



Dr. Ir. MOCH. TRANGGONO, M.Sc.
NIP. 19631210 199003 1 005

KEPALA BIRO PENGADAAN BARANG/JASA,



Ir. SOERJO SOEBIANDONO, MA
NIP. 19711025 200112 1 001



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **Dr. M. YUSUF, S.Sos, M.Si**

Jabatan : **Plt. KEPALA BIRO PEREKONOMIAN DAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN**

selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **Dr. Ir. MOCH. TRANGGONO, M.Sc.**

Jabatan : **Pj. SEKERTARIS DAERAH**

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

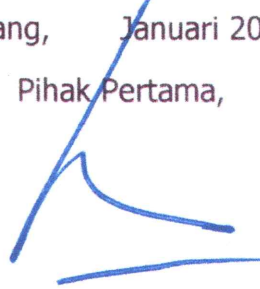
Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Serang, Januari 2023

Pihak Pertama,

Pihak Kedua,

Dr. Ir. MOCH. TRANGGONO, M.Sc.
NIP. 19631210 199003 1 005


Dr. M. YUSUF, S.Sos, M.Si
NIP. 19650824 198712 1 002

SATUAN KERJA : BIRO PEREKONOMIAN DAN
ADMINISTRASI PEMBANGUNAN

DPA TA-2023

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET
1	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan	Capaian SAKIP (Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah) Perangkat Daerah	Nilai	70-80
2	Meningkatnya Kulaitas Kebijakan Perekonomian Daerah	Persentase realisasi rumusan Kebijakan Bidang Perekonomian Daerah yang di implementasikan	Persen	100
3	Meningkatnya Kulaitas Kebijakan Administrasi Pembangunan	Persentase realisasi rumusan kebijakan Administrasi Pembangunan yang diimplementasikan	Persen	100

PENDAPATAN DAERAH

KODE	URAIAN	ANGGARAN
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	0

BELANJA DAERAH

KODE	URUSAN/PROGRAM	ANGGARAN
4.01	SEKRETARIAT DAERAH	4.550.000.000
4.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	2.358.929.749
4.01.06	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	1.191.070.251
4.01.08	PROGRAM KEBIJAKAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN	1.000.000.000
	TOTAL BELANJA	4.550.000.000

Pj. SEKERTARIS DAERAH



Dr. Ir. MOCH. TRANGGONO, M.Sc.
NIP. 19631210 199003 1 005

Plt. KEPALA BIRO PEREKONOMIAN
DAN ADMINISTRASI
PEMBANGUNAN,

Dr. M. YUSUF, S.Sos, M.Si
NIP. 19650824 198712 1 002



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **Drs. E. A. DENI HERMAWAN, M. Si**

Jabatan : **Plt. KEPALA BIRO ORGANISASI DAN REFORMASI BIROKRASI**

selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **Dr. Ir. MOCH. TRANGGONO, M.Sc.**

Jabatan : **Pj. SEKERTARIS DAERAH**

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Serang, Januari 2023

Pihak Pertama,

Pihak Kedua,

Dr. Ir. MOCH. TRANGGONO, M.Sc.
NIP. 19631210 199003 1 005

Drs. E. A. DENI HERMAWAN, M. Si
NIP. 19671228 199312 1 001

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET
1	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan	Capaian SAKIP (Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah) Perangkat Daerah	Nilai	70-80
2	Meningkatnya Kualitas Kelembagaan yang terukur	Indeks Kelembagaan	Nilai	41-60
3	Meningkatnya Kepatuhan Pelayanan Publik	Kepatuhan Pelayanan Publik	Nilai	81,81
4	Meningkatkan Nilai Komponen Pelaporan SAKIP Provinsi (Penugasan dari Sekretaris Daerah)	Nilai Komponen Pelaporan SAKIP Provinsi	Nilai	10, 77

PENDAPATAN DAERAH

KODE	URAIAN	ANGGARAN
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	0

BELANJA DAERAH

KODE	URUSAN/PROGRAM	ANGGARAN
4.01	SEKRETARIAT DAERAH	3.464.817.000
4.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	645.634.000
4.01.02	PROGRAM PENATAAN ORGANISASI	2.819.183.000
	TOTAL BELANJA	3.464.817.000

Pj. SEKERTARIS DAERAH



Dr. Ir. MOCH. TRANGGONO, M.Sc.
NIP. 19631210 199003 1 005

Plt. KEPALA BIRO ORGANISASI DAN REFORMASI BIROKRASI,

Drs. E. A. DENI HERMAWAN, M. Si
NIP. 19671228 199312 1 001



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **ZULKARNAEN, SE., M.Si**

Jabatan : **Plt. KEPALA BIRO UMUM**

selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **Dr. Ir. MOCH. TRANGGONO, M.Sc.**

Jabatan : **Pj. SEKERTARIS DAERAH**

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Serang, Januari 2023

Pihak Kedua,

Pihak Pertama,


Dr. Ir. MOCH. TRANGGONO, M.Sc.
NIP. 19631210 199003 1 005


ZULKARNAEN, SE., M.Si
NIP. 19730201 200112 1 002

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET
1	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan	Capaian SAKIP (Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah) Perangkat Daerah	Nilai	70-80
2	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Setda	Persentasi Realisasi Pelayanan SETDA	Persen	100

PENDAPATAN DAERAH

KODE	URAIAN	ANGGARAN
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	0

BELANJA DAERAH

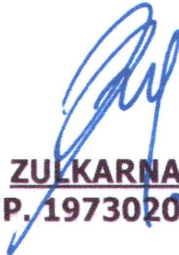
KODE	URUSAN/PROGRAM	ANGGARAN
4.01	SEKRETARIAT DAERAH	202.104.224.715
4.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	202.104.224.715
	TOTAL BELANJA	202.104.224.715

Plt. SEKRETARIS DAERAH



Dr. Ir. MOCH. TRANGGONO, M.Sc.
NIP. 19631210 199003 1 005

Plt. KEPALA BIRO UMUM,



ZULKARNAEN, SE., M.Si
NIP. 19730201 200112 1 002



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **BENI ISMAIL, S.STP, M.Si**

Jabatan : **KEPALA BIRO ADMINISTRASI PIMPINAN**

selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **Dr. Ir. MOCH. TRANGGONO, M.Sc.**

Jabatan : **Pj. SEKERTARIS DAERAH**

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Serang, Januari 2023

Pihak Pertama,



Dr. Ir. MOCH. TRANGGONO, M.Sc.
NIP. 19631210 199003 1 005

BENI ISMAIL, S.STP, M.Si
NIP. 19760905 199602 1 002

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET
1	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan	Capaian SAKIP (Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah) Perangkat Daerah	Nilai	70-80
2	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Pimpinan Daerah	Persentasi Realisasi Pelayanan Pimpinan Daerah	Persen	100

PENDAPATAN DAERAH

KODE	URAIAN	ANGGARAN
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	0

BELANJA DAERAH

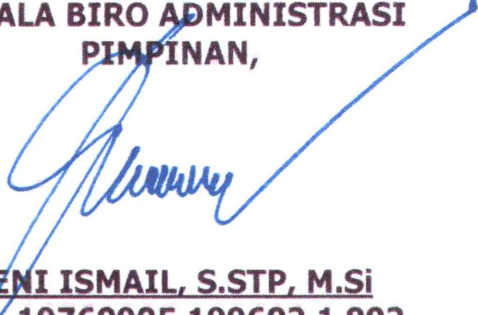
KODE	URUSAN / PROGRAM	ANGGARAN
4.01	SEKRETARIAT DAERAH	14.354.794.000
4.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	14.354.794.000
	TOTAL BELANJA	14.354.794.000

Pj. SEKERTARIS DAERAH,



Dr. Ir. MOCH. TRANGGONO, M.Sc.
NIP. 19631210 199003 1 005

KEPALA BIRO ADMINISTRASI PIMPINAN,



BENI ISMAIL, S.STP, M.Si
NIP. 19760905 199602 1 002



PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **Ir. Hj. VIRGOJANTI, M.Si**

Jabatan : **Pj. SEKRETARIS DAERAH**

selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **AL MUKTABAR**

Jabatan : **Pj. GUBERNUR BANTEN**

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Serang, 1 November 2023

Pihak Kedua,


AL MUKTABAR

Pihak Pertama,


Ir. Hj. VIRGOJANTI, M.Si
NIP. 19680902 199603 2 002

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET
1	Meningkatnya Kualitas Keluarga Sejahtera	Indeks Pembangunan Keluarga	Nilai	58,13
2	Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Daerah Perbatasan	Indeks Desa Membangun (IDM)	Indeks	0,67
3	Meningkatnya Pelayanan Sosial	Proporsi Penduduk Miskin yang mendapatkan Pelayanan Sosial	Persen	7,74
4	Meningkatnya Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)	Persen	65,19
5	Meningkatnya Pemerataan Akses dan Kualitas Pendidikan Masyarakat	Rata-rata Lama sekolah (RLS)	Tahun	9,11
		Harapan Lama Sekolah (HLS)	Tahun	13,75
6	Meningkatnya kualitas kesehatan masyarakat	Angka Harapan Hidup (AHH)	Tahun	70,4
		Prevalensi Stunting pada Balita	Persen	23,5
7	Meningkatnya Pembangunan dan Pemberdayaan Gender	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	Indeks	93,07
8	Terbentuknya Karakter dan Jati Diri Masyarakat yang berakhlak Mulia dan Berbudaya	Indeks Pembangunan Kebudayaan	Nilai	55,03
		Indeks Pembangunan Pemuda dan Olahraga	Nilai	49,42
9	Meningkatnya Daya Beli Masyarakat	Pengeluaran Per Kapita Tahunan yang disesuaikan	Ribu Rupiah	12.168
10	Meningkatnya Iklim Investasi dan Usaha	Pertumbuhan Pembentukan Modal Tetap Bruto (TMTB)	Persen	3,97
11	Meningkatnya Kontribusi Sektor Industri dan Perdagangan	Laju Pertumbuhan Ekonomi Sektor Industri	Persen	4,99
		Laju Pertumbuhan Ekonomi Sektor Perdagangan	Persen	2,44
12	Meningkatnya Kontribusi Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Laju Pertumbuhan Ekonomi Sektor Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Persen	4,39

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET
13	Meningkatnya Kontribusi Sektor Pertanian dan Kelautan	Laju Pertumbuhan Ekonomi Sektor Pertanian dan Kelautan	Persen	0,68
14	Meningkatnya Kualitas dan Kuantitas Infrastruktur Dasar dan Strategis	Indeks Daya Saing Infrastruktur	Nilai	Tinggi
15	Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup dan Pengelolaan Sumber Daya Alam	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	Nilai	62,99
16	Meningkatnya Mitigasi Kesiapsiagaan dan Tanggap Darurat Bencana	Indeks Risiko Bencana	Nilai	147,37
17	Meningkatnya Penyelenggaraan Reformasi Birokrasi	Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah	Indeks	82,2
		Indeks Persepsi Anti Korupsi	Nilai	2
		Indeks Persepsi Kualitas Layanan Publik	Nilai	3,47
		Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (SAKIP)	Nilai	69,77
18	Meningkatnya Stabilitas Ketahanan Nasional di Provinsi Banten	Indeks Ketahanan Nasional Provinsi Banten	Nilai	Cukup Tangguh

PENDAPATAN DAERAH

KODE	URAIAN	ANGGARAN
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	0

BELANJA DAERAH

KODE	URUSAN/PROGRAM	ANGGARAN
4.01	SEKRETARIAT DAERAH	248.211.269.200
4.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	220.239.738.564
4.01.02	PROGRAM PENATAAN ORGANISASI	2.163.824.000
4.01.03	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH	2.761.309.400
4.01.04	PROGRAM KESEJAHTERAAN RAKYAT	17.106.325.900

KODE	URUSAN/PROGRAM	ANGGARAN
4.01.05	PROGRAM FASILITASI DAN KOORDINASI HUKUM	2.688.043.200
4.01.06	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	945.580.251
4.01.07	PROGRAM KEBIJAKAN DAN PELAYANAN PENGADAAN BARANG DAN JASA	1.690.742.485
4.01.08	PROGRAM KEBIJAKAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN	615.705.400
	JUMLAH BELANJA	248.211.269.200

Pj. GUBERNUR BANTEN,

Pj. SEKRETARIS DAERAH,



AL MUKTABAR



IR. HJ. VIRGOJANTI, M.Si
NIP. 19680902 199603 2 002



PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **Dr. KOMARUDIN, MAP**

Jabatan : **Plt. ASISTEN PEMERINTAHAN UMUM DAN KESEJATERAAN RAKYAT**

selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **AL MUKTABAR**

Jabatan : **Pj. GUBERNUR BANTEN**

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Serang, 1 November 2023

Pihak Pertama,


AL MUKTABAR


Dr. KOMARUDIN, MAP
NIP. 19700721 199101 1 002

SATUAN KERJA : ASISTEN PEMERINTAHAN UMUM
DAN KESEJATERAAN RAKYAT

DPPA TA-2023

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGE T
1	Meningkatnya Kualitas Keluarga Sejahtera	Indeks Pembangunan Keluarga	Nilai	58,13
2	Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Daerah Perbatasan	Indeks Desa Membangun (IDM)	Indeks	0,67
3	Meningkatnya Pelayanan Sosial	Proporsi Penduduk Miskin yang mendapatkan Pelayanan Sosial	Persen	7,74
4	Meningkatnya Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)	Persen	65,19
5	Meningkatnya Pemerataan Akses dan Kualitas Pendidikan Masyarakat	Rata-rata Lama sekolah (RLS)	Tahun	9,11
		Harapan Lama Sekolah (HLS)	Tahun	13,75
6	Meningkatnya kualitas kesehatan masyarakat	Angka Harapan Hidup (AHH)	Tahun	70,4
		Prevalensi Stunting pada Balita	Persen	23,5
7	Meningkatnya Pembangunan dan Pemberdayaan Gender	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	Indeks	93,07
8	Terbentuknya Karakter dan Jati Diri Masyarakat yang berakhlak Mulia dan Berbudaya	Indeks Pembangunan Kebudayaan	Nilai	55,03
		Indeks Pembangunan Pemuda dan Olahraga	Nilai	49,42

Pj. GUBERNUR BANTEN,

AL-MUKTABAR

Plt. ASISTEN PEMERINTAHAN UMUM
DAN KESEJATERAAN RAKYAT,

SETDA
Dr. KOMARUDIN, MAP
NIP. 19700721 199101 1 002



PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **Dr. H. M. YUSUF, S.Sos, M.Si**

Jabatan : **Plt. ASISTEN PEMBANGUNAN, PEREKONOMIAN DAN PENGADAAN**

selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **AL MUKTABAR**

Jabatan : **Pj. GUBERNUR BANTEN**

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Serang, 1 November 2023

Pihak Pertama,

Pihak Kedua,

AL MUKTABAR


Dr. H. M. YUSUF, S.Sos, M.Si
NIP. 19650824 198712 1 002

**SATUAN KERJA : ASISTEN PEMBANGUNAN,
PEREKONOMIAN DAN PENGADAAN**

DPPA TA-2023

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET
1	Meningkatnya Daya Beli Masyarakat	Pengeluaran Per Kapita Tahunan yang disesuaikan	Ribu Rupiah	12.168
2	Meningkatnya Iklim Investasi dan Usaha	Pertumbuhan Pembentukan Modal Tetap Bruto (TMTB)	Persen	3,97
3	Meningkatnya Kontribusi Sektor Industri dan Perdagangan	Laju Pertumbuhan Ekonomi Sektor Industri	Persen	4,99
		Laju Pertumbuhan Ekonomi Sektor Perdagangan	Persen	2,44
4	Meningkatnya Kontribusi Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Laju Pertumbuhan Ekonomi Sektor Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Persen	4,39
5	Meningkatnya Kontribusi Sektor Pertanian dan Kelautan	Laju Pertumbuhan Ekonomi Sektor Pertanian dan Kelautan	Persen	0,68
6	Meningkatnya Kualitas dan Kuantitas Infrastruktur Dasar dan Strategis	Indeks Daya Saing Infrastruktur	Nilai	Tinggi
7	Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup dan Pengelolaan Sumber Daya Alam	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	Nilai	62,99
8	Meningkatnya Mitigasi Kesiapsiagaan dan Tanggap Darurat Bencana	Indeks Risiko Bencana	Nilai	147,37



GUBERNUR BANTEN,

AL MUKTABAR

**Pt. ASISTEN PEMBANGUNAN,
PEREKONOMIAN DAN PENGADAAN,**



**Dr. H. M. YUSUF, S.Sos, M.Si
NIP. 19650824 198712 1 002**



PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **Drs. E. A. DENI HERMAWAN, M. Si**

Jabatan : **Plt. ASISTEN ADMINISTRASI UMUM**

selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **AL MUKTABAR**

Jabatan : **Pj. GUBERNUR BANTEN**

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Serang, 1 November 2023

Pihak Pertama,

Pihak Kedua,

AL MUKTABAR


Drs. E. A. DENI HERMAWAN, M. Si
NIP. 19671228 199312 1 001

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET
1	Meningkatnya Penyelenggaraan Reformasi Birokrasi	Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah	Indeks	82,20
		Indeks Persepsi Anti Korupsi	Nilai	2
		Indeks Persepsi Kualitas Layanan Publik	Nilai	3,47
		Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (SAKIP)	Nilai	69,77

Pt. GUBERNUR BANTEN,

AL MUKTABAR

Pt. ASISTEN ADMINISTRASI UMUM,

Drs. E. A. DENI HERMAWAN, M. Si
NIP. 19671228 199312 1 001



PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **GUNAWAN RUSMINTO, AP, M.Si**

Jabatan : **Plt. EPALA BIRO PEMERINTAHAN DAN ORGANISASI DAERAH**

selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **Ir. Hj. VIRGOJANTI, M.Si.**

Jabatan : **Pj. SEKERTARIS DAERAH**

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Serang, 1 November 2023

Pihak Kedua,



Ir. Hj. VIRGOJANTI, M.Si.
NIP. 19680902 199603 2 002

Pihak Pertama,



GUNAWAN RUSMINTO, AP, M.Si
NIP. 19741004 199402 1 002

SATUAN KERJA : BIRO PEMERINTAHAN DAN ORGANISASI DAERAH

DPPA TA-2023

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET
1	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan	Capaian SAKIP (Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah) Perangkat Daerah	Skor/ Nilai	70-80
2	Meningkatnya Kerjasama dan penyelenggaraan adminstrasi pemerintahan	Skoring/Nilai Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Nilai	4,24
3	Meningkatkan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	Persentase Realisasi Rumusan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat yang diimplementasikan	Persen	100

PENDAPATAN DAERAH

KODE	URAIAN	ANGGARAN
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	0

BELANJA DAERAH

KODE	URUSAN/PROGRAM	ANGGARAN
4.01	SEKRETARIAT DAERAH	23.031.247.500
4.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	3.163.612.200
4.01.03	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH	2.761.309.400
4.01.04	PROGRAM KESEJAHTERAAN RAKYAT	17.106.325.900
	JUMLAH BELANJA	23.031.247.500

Pj. SEKERTARIS DAERAH



H. HIR VIRGOJANTI, M.Si.
NIP. 19680902 199603 2 002

Plt. KEPALA BIRO PEMERINTAHAN DAN ORGANISASI DAERAH,



GUNAWAN RUSMINTO, AP, M.Si
NIP. 19741004 199402 1 002



PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **HADI PRAWOTO, SH**

Jabatan : **Plt. KEPALA BIRO HUKUM**

selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **Ir. Hj. VIRGOJANTI, M.Si.**

Jabatan : **Pj. SEKERTARIS DAERAH**

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Serang, 1 November 2023

Pihak Kedua,



Ir. Hj. VIRGOJANTI, M.Si.
NIP. 19680902 199603 2 002

Pihak Pertama,



HADI PRAWOTO, SH
NIP. 19670619 199403 1 002

SATUAN KERJA : BIRO HUKUM

DPPA TA-2023

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET
1	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan	Capaian SAKIP (Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah) Perangkat Daerah	Nilai	70-80
2	Meningkatnya Kualitas Kebijakan Daerah	Indeks Kualitas Kebijakan	Nilai	60

PENDAPATAN DAERAH

KODE	URAIAN	ANGGARAN
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	0

BELANJA DAERAH

KODE	URUSAN/PROGRAM	ANGGARAN
4.01	SEKRETARIAT DAERAH	3.292.050.000
4.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	604.006.800
4.01.05	PROGRAM FASILITASI DAN KOORDINASI HUKUM	2.688.043.200
	JUMLAH BELANJA	3.292.050.000

Pj. SEKERTARIS DAERAH,



Ir. Hl. VIRGOJANTI, M.Si.
NIP. 19680902 199603 2 002

Pt. KEPALA BIRO HUKUM,



HADI PRAWOTO, SH
NIP. 19670619 199403 1 002



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **Ir. SOERJO SOEBIANDONO, MA**

Jabatan : **Plt. KEPALA BIRO PENGADAAN BARANG/JASA DAN LAYANAN PENGADAAN SECARA ELEKTRONIK**

selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **Ir. Hj. VIRGOJANTI, M.Si.**

Jabatan : **Pj. SEKERTARIS DAERAH**

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Serang, 1 November 2023

Pihak Kedua,

Pihak Pertama,



Ir. Hj. VIRGOJANTI, M.Si.
NIP. 19680902 199603 2 002



Ir. SOERJO SOEBIANDONO, MA
NIP. 19711025 200112 1 001

SATUAN KERJA : BIRO PENGADAAN BARANG/JASA
DAN LAYANAN PENGADAAN SECARA
ELEKTRONIK

DPPA TA-2023

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET
1	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan	Capaian SAKIP (Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah) Perangkat Daerah	Nilai	70-80
2	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pengadaan Barang dan Jasa yang baik dan bebas KKN	Indeks Tata Kelola Pengadaan Barang dan Jasa	Nilai	80,80

PENDAPATAN DAERAH

KODE	URAIAN	ANGGARAN
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	0

BELANJA DAERAH

KODE	URUSAN/PROGRAM	ANGGARAN
4.01	SEKRETARIAT DAERAH	4.080.785.485
4.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	2.390.043.000
4.01.07	PROGRAM KEBIJAKAN DAN PELAYANAN PENGADAAN BARANG DAN JASA	1.690.742.485
	JUMLAH BELANJA	4.080.785.485

Pj. SEKERTARIS DAERAH


Ir. Hj. VIRGOJANTI, M.Si.
NIP. 19680902 199603 2 002

Plt. KEPALA BIRO PENGADAAN
BARANG/JASA DAN LAYANAN
PENGADAAN SECARA ELEKTRONIK,


Ir. SOERJO SOEBIANDONO, MA
NIP. 19711025 200112 1 001



PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **Dr. H. M. YUSUF, S.Sos, M.Si**
Jabatan : **Plt. KEPALA BIRO PEREKONOMIAN DAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN**

selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **Ir. Hj. VIRGOJANTI, M.Si.**
Jabatan : **Pj. SEKERTARIS DAERAH**

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Serang, 1 November 2023

Pihak Kedua,

Ir. Hj. VIRGOJANTI, M.Si.
NIP. 19680902 199603 2 002

Pihak Pertama,

Dr. H. M. YUSUF, S.Sos, M.Si
NIP. 19650824 198712 1 002

SATUAN KERJA : BIRO PEREKONOMIAN DAN
ADMINISTRASI PEMBANGUNAN

DPPA TA-2023

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET
1	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan	Capaian SAKIP (Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah) Perangkat Daerah	Nilai	70-80
2	Meningkatnya Kulaitas Kebijakan Perekonomian Daerah	Persentase realisasi rumusan Kebijakan Bidang Perekonomian Daerah yang di implementasikan	Persen	100
3	Meningkatnya Kulaitas Kebijakan Administrasi Pembangunan	Persentase realisasi rumusan kebijakan Administrasi Pembangunan yang diimplementasikan	Persen	100

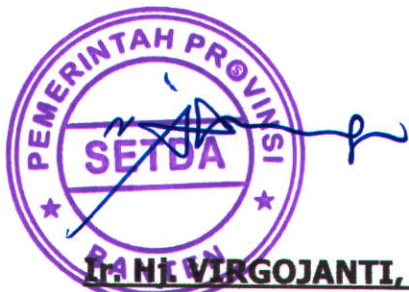
PENDAPATAN DAERAH

KODE	URAIAN	ANGGARAN
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	0

BELANJA DAERAH

KODE	URUSAN/PROGRAM	ANGGARAN
4.01	SEKRETARIAT DAERAH	3.753.682.000
4.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	2.192.396.349
4.01.06	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	945.580.251
4.01.08	PROGRAM KEBIJAKAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN	615.705.400
	JUMLAH BELANJA	3.753.682.000

Pj. SEKERTARIS DAERAH



Dr. H. VIRGOJANTI, M.Si.
NIP. 19680902 199603 2 002

Pit. KEPALA BIRO PEREKONOMIAN
DAN ADMINISTRASI
PEMBANGUNAN,



Dr. H. M. YUSUF, S.Sos, M.Si
NIP. 19650824 198712 1 002



PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **AKHMAD THAMRIN, ST, M.Si**

Jabatan : **Plt. KEPALA BIRO ORGANISASI DAN REFORMASI BIROKRASI**

selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **Ir. Hj. VIRGOJANTI, M.Si.**

Jabatan : **Pj. SEKERTARIS DAERAH**

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Serang, 1 November 2023

Pihak Kedua,


Ir. Hj. VIRGOJANTI, M.Si.
NIP. 19680902 199603 2 002

Pihak Pertama,


AKHMAD THAMRIN, ST, M.Si
NIP. 19680725 199703 1 005

SATUAN KERJA : BIRO ORGANISASI DAN REFORMASI
BIROKRASI

DPPA TA-2023

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET
1	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan	Capaian SAKIP (Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah) Perangkat Daerah	Nilai	70-80
2	Meningkatnya Kualitas Kelembagaan yang terukur	Indeks Kelembagaan	Nilai	41-60
3	Meningkatnya Kepatuhan Pelayanan Publik	Kepatuhan Pelayanan Publik	Nilai	81,81
4	Meningkatnya Kualitas Informasi Kinerja Perangkat Daerah	Nilai Komponen Pelaporan SAKIP Provinsi	Nilai	10,77

PENDAPATAN DAERAH

KODE	URAIAN	ANGGARAN
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	0

BELANJA DAERAH

KODE	URUSAN/PROGRAM	ANGGARAN
4.01	SEKRETARIAT DAERAH	2.773.092.000
4.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	609.268.000
4.01.02	PROGRAM PENATAAN ORGANISASI	2.163.824.000
	JUMLAH BELANJA	2.773.092.000

Pj. SEKERTARIS DAERAH



IA. HI. VIRGOJANTI, M.Si.
NIP. 19680902 199603 2 002

Plt. KEPALA BIRO ORGANISASI DAN REFORMASI BIROKRASI,



AKHMAD THAMRIN, ST, M.Si
NIP. 19680725 199703 1 005



PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **Dr. Hj. RINA DEWIYANTI, S.E., M.Si.**

Jabatan : **Plt. KEPALA BIRO UMUM DAN PERLENGKAPAN**

selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **Ir. Hj. VIRGOJANTI, M.Si.**

Jabatan : **Pj. SEKERTARIS DAERAH**

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Serang, 1 November 2023

Pihak Kedua,

Pihak Pertama,



Ir. Hj. VIRGOJANTI, M.Si.
NIP. 19680902 199603 2 002



Dr. Hj. RINA DEWIYANTI, S.E., M.Si.
NIP. 19730201 200112 1 002

SATUAN KERJA : BIRO UMUM DAN PERLENGKAPAN

DPPA TA-2023

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET
1	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan	Capaian SAKIP (Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah) Perangkat Daerah	Nilai	70-80
2	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Setda	Persentase Realisasi Pelayanan SETDA	Persen	100

PENDAPATAN DAERAH

KODE	URAIAN	ANGGARAN
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	0

BELANJA DAERAH

KODE	URUSAN/PROGRAM	ANGGARAN
4.01	SEKRETARIAT DAERAH	200.205.899.215
4.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	200.205.899.215
	JUMLAH BELANJA	200.205.899.215

Pj. SEKERTARIS DAERAH



Dr. Hj. VIRGOJANTI, M.Si.
NIP. 19680902 199603 2 002

Plt. KEPALA BIRO UMUM DAN PERLENGKAPAN,



Dr. Hj. RINA DEWIYANTI, S.E., M.Si.
NIP. 19670928 199303 2 009



PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **BENI ISMAIL, S.STP, M.Si**

Jabatan : **Plt. KEPALA BIRO ADMINISTRASI PIMPINAN DAN PROTOKOL**

selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **Ir. Hj. VIRGOJANTI, M.Si.**

Jabatan : **Pj. SEKERTARIS DAERAH**

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Serang, 1 November 2023

Pihak Kedua,



Ir. Hj. VIRGOJANTI, M.Si.
NIP. 19680902 199603 2 002

Pihak Pertama,



BENI ISMAIL, S.STP, M.Si
NIP. 19760905 199602 1 002

SATUAN KERJA : BIRO ADMINISTRASI PIMPINAN DAN PROTOKOL

DPPA TA-2023

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET
1	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan	Capaian SAKIP (Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah) Perangkat Daerah	Nilai	70-80
2	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Pimpinan Daerah	Persentasi Realisasi Pelayanan Pimpinan Daerah	Persen	100

PENDAPATAN DAERAH

KODE	URAIAN	ANGGARAN
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	0

BELANJA DAERAH

KODE	URUSAN/PROGRAM	ANGGARAN
4.01	SEKRETARIAT DAERAH	11.074.513.000
4.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	11.074.513.000
	JUMLAH BELANJA	11.074.513.000

Pj. SEKERTARIS DAERAH,



Ir. Hj. VIRGOJANTI, M.Si.
NIP. 19680902 199603 2 002

Plt. KEPALA BIRO ADMINISTRASI PIMPINAN DAN PROTOKOL,



BENI ISMAIL, S.STP, M.Si
NIP. 19760905 199602 1 002



PEMERINTAH PROVINSI BANTEN INSPEKTORAT DAERAH

Kawasan Pusat Pemerintahan Provinsi Banten (KP3B) Tel. (0254) 7039946, Fax. (0254) 267041 Palima- Serang

PERNYATAAN REVIU ATAS LAPORAN KINERJA (LKj) SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI BANTEN TAHUN ANGGARAN 2023

Kami telah mereviu Laporan Kinerja (LKj) Sekretariat Daerah Provinsi Banten untuk Tahun 2023 sesuai Pedoman Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP). Substansi informasi yang dimuat dalam Laporan Kinerja menjadi tanggung jawab manajemen Sekretariat Daerah Provinsi Banten.

Reviu bertujuan untuk memberikan keyakinan terbatas laporan kinerja telah disajikan secara akurat, andal, dan valid.

Berdasarkan reviu kami, tidak terdapat kondisi atau hal-hal yang menimbulkan perbedaan dalam meyakini keandalan informasi yang disajikan di dalam laporan kinerja ini.

Serang, Februari 2024

**Plt. INSPEKTUR DAERAH
PROVINSI BANTEN**

USMAN ASSHIDDIQI QOHARA, S.Sos, M.Si

Pembina Utama Muda
NIP. 19700320 200112 1 002

PIAGAM

Anugerah Pengadaan 2023

Diberikan Kepada

PROVINSI BANTEN

Kategori:

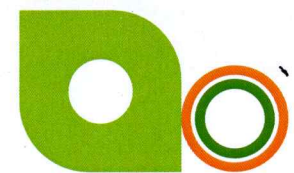
**PEMERINTAH PROVINSI DENGAN NILAI TRANSAKSI UMK TERBESAR
PERINGKAT 3**

Jakarta, 7 November 2023

Kepala LKPP



Dr. H. Hendrar Prihadi, S.E., M.M



ABM
Agrobisnis Banten Mandiri



PlazaBanten



LKPP
Lembaga Kebijakan
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah



bela
pengadaan



BANK INDONESIA
BANK SENTRAL REPUBLIK INDONESIA



PLAGAM PENGHARGAAN

Diberikan kepada :

Biro Pengadaan Barang/Jasa dan LPSE Prov. Banten

Sebagai :

**Mitra Plaza Banten dalam Mewujudkan
UMKM Go Digital**

Terimakasih sudah menjadi salah satu Mitra Plaza Banten
dalam Mewujudkan UMKM Go Digital.

Kota Tangerang, 18 Maret 2023

Direktur Utama PT Agrobisnis Banten Mandiri (Perseroda)

H. Saeful Wijaya



MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA

PIAGAM PENGHARGAAN

NOMOR : M.HH-18.OT.03.01 TAHUN 2023

Diberikan kepada :

PEMERINTAH PROVINSI BANTEN

Sebagai

TERBAIK II DENGAN PREDIKAT ISTIMEWA

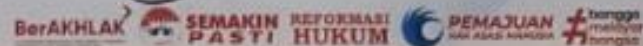
pada Penilaian Indeks Reformasi Hukum (IRH) Tahun 2023 Kategori Pemerintah Provinsi

Jakarta, 08 Desember 2023

Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia,



Yasonna H. Laoly





MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA

PIAGAM PENGHARGAAN

NOMOR : M.HH-02.HN.03.05 TAHUN 2023

Diberikan kepada :

PROVINSI BANTEN

Sebagai :

**Anggota Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional Terbaik IV Tahun 2023
Tingkat Provinsi**

dalam rangka pelaksanaan
Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2012
tentang
Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional (JDIHN)

Jakarta, 12 Oktober 2023

Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia

Yasonna H. Laoly